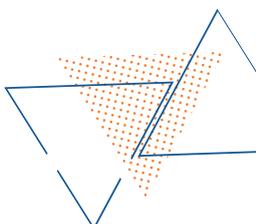


LAPORAN KINERJA TRIWULAN III



**BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR
DAN LAUT PONTIANAK**



2024

Tim Penyusun

Pengarah:

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Penyusun:

Graziano Raymond P., S.Pi., M.Si.

Akmal Fathu Rohman, S.Si.

Vita Fitriana Mayasari, S.Si.

Kontributor:

Subbagian Umum

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdikan kepada-Nya dan mengabdikan kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Negara ini adalah disusunnya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Pontianak Triwulan III Tahun 2024.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan BPSPL Pontianak periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Selain itu, LKj ini memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Diharapkan program dan kegiatan di Satker BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi *stakeholder* kami

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 17 Oktober 2024
Kepala BPSPL Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Triwulan III Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara daring melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Proses perhitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas **13 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM)** dengan total **24 Indikator Kinerja Kegiatan**. Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU+IKM atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I yaitu **107,50%** (kategori Hijau = Baik).

Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang terukur pada Triwulan III yaitu:

1. Penyerahan Bantuan kompak dengan capaian sebanyak 2 kelompok dari target 2 kelompok sehingga tercapai 100%.
2. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 3 laporan dari target 3 laporan sehingga tercapai 100%.
3. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar dengan capaian 133,33 dari target 94 sehingga tercapai 120%.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dengan capaian 100% dari target 80% sehingga tercapai 120%.

Pagu awal anggaran BPSPL Pontianak sebesar **Rp 18.598.113.000**. Realisasi anggaran pada Triwulan III berdasarkan aplikasi Omspan per tanggal 30 September 2024 yaitu **Rp14.764.929.183** atau **79,39%** dari pagu bruto. Berdasarkan kondisi terkini pelaksanaan program kegiatan yang mendukung kinerja BPSPL Pontianak berjalan dengan baik. Namun, terdapat kendala terkait dengan kegiatan pendukung untuk Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Hal itu dikarenakan masih belum ada dasar hukum yang kuat bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan Pelayanan Perizinan di Perairan Umum Daratan. Terdapat perubahan Rincian Output pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang semula REA.003 (output 21.000 hektar) menjadi SCC.001 (output 60 orang) sehingga perlu adanya penyesuaian target IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Upaya yang akan dilakukan pada Triwulan IV dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar secara luring atau daring.
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Perubahan Perjanjian Kinerja pada satuan IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang difasilitasi mata pencaharian baru menjadi 60 (Orang).

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada Triwulan II tahun 2024 yaitu mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis dan seminar secara luring atau daring. Selain itu, telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP) terkait dengan dasar hukum Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi di Perairan Umum Daratan oleh KKP. Berdasarkan koordinasi yang dilaksanakan, diperoleh informasi bahwa KKP masih belum dapat melakukan pelayanan perizinan kawasan konservasi di perairan umum daratan dikarenakan belum terdapat aturan yang mengatur hal tersebut. Sehingga sampai dengan Triwulan III BPSPL Pontianak belum dapat melakukan pelayanan perizinan kawasan konservasi di perairan Mahakam wilayah Hulu.

Daftar Isi

Tim Penyusun.....	I
Kata Pengantar.....	II
Ringkasan Eksekutif	III
Daftar Isi	IV
Daftar Gambar.....	VI
Daftar Tabel.....	VII
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
1.1.1. Kedudukan	1
1.1.2. Tugas	1
1.1.3. Fungsi.....	1
1.2. Susunan Organisasi	3
1.3. Keragaman SDM	4
1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	4
1.4.1. Potensi	4
1.4.2. Permasalahan	5
1.5. Dasar Hukum.....	6
1.6. Sistematika Penyajian	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024.....	8
2.1.1. Visi.....	9
2.1.2. Misi.....	9
2.1.3. Tujuan	10
2.1.4. Sasaran Strategis.....	10
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024.....	11
2.3. Metode Pengukuran Kinerja.....	16
2.3.1. Rumusan Pengukuran.....	16
2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.1.1.Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBPN BPSPL Pontianak.....	21
3.1.2.Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	24

3.1.3.Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	29
3.1.4.Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	34
3.1.5.Sasaran Kegiatan 5 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	44
3.1.6.Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	47
3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak	53
3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak	59
3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak	66
3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	74
3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak.	77
3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak.....	83
3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain	115
3. 3. Realisasi Anggaran.....	113
BAB IV PENUTUP.....	116
4.1. Kesimpulan.....	116
4.2. Rekomendasi.....	116
4.3. Tindak Lanjut	116
LAMPIRAN.....	117

Daftar Gambar

Gambar 1.1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	3
Gambar 1.1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak.....	4
Gambar 3.1.1 1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerja)	18
Gambar 3.1.1 2. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan III	19
Gambar 3.1.1 3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan III	20
Gambar 3.1.1 1. Tren Capaian PNBPN dari Tahun 2022	22
Gambar 3.1.2 1. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya.....	26
Gambar 3.1.2 2. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang	26
Gambar 3.1.2 3. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut.....	27
Gambar 3.1.2 4. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan.....	27
Gambar 3.1.2 5. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang.....	28
Gambar 3.1.2 6. Gerakan Bersih sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah.....	28
Gambar 3.1.2 7. Realisasi Anggaran IKU II Triwulan III	29
Gambar 3.1.3 1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL.....	31
Gambar 3.1.3 2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.....	32
Gambar 3.1.3 3. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut	32
Gambar 3.1.3 4. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 hingga Triwulan III	33
Gambar 3.1.4 1. Aspek Penilaian EVIKA.....	34
Gambar 3.1.4 2. Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu	37
Gambar 3.1.4 3. Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan.....	38
Gambar 3.1.4 4. Pelaksanaan Conservation Goes to School.....	38
Gambar 3.1.4 5. Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi	39
Gambar 3.1.4 6. Pengamatan Populasi Pesut.....	39
Gambar 3.1.4 7. Survei Kualitas Air Kawasan Mahakam Hulu.....	40
Gambar 3.1.4 8. Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting	41
Gambar 3.1.4 9. Survei Sosial Ekonomi.....	42
Gambar 3.1.4 10. FGD Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu	42
Gambar 3.1.4 11. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 4 hingga Triwulan III.....	43
Gambar 3.1.5 1. Fasilitas Penilaian EVIKA di Kalimantan Utara & Kalimantan Tengah.....	45
Gambar 3.1.5 2. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 5 hingga Triwulan III	46
Gambar 3.1.6 1. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama	48
Gambar 3.1.6 2. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 6 hingga Triwulan III	49
Gambar 3.1.6 3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan	51
Gambar 3.1.6 4. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 7 hingga Triwulan III	52
Gambar 3.1.7 1. Grafik Capaian Bantuan KOMPAK Triwulan III tiap Tahun	54
Gambar 3.1.7 2. Serah Terima Bantuan KOMPAK.....	55
Gambar 3.1.7 3. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan III	56
Gambar 3.1.7 4. Identifikasi Kelompok Mata Pencaharian Alternatif di KK Mahakam Hulu ..	58
Gambar 3.1.8 1. Survei Populasi Lola di Kalimantan Barat.....	61
Gambar 3.1.8 2. Dokumentasi Penanganan Biota Terdampar.....	62
Gambar 3.1.8 3. Grafik Penanganan Biota Terdampar	62
Gambar 3.1.8 4. Grafik Hasil Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat.....	63
Gambar 3.1.8 5. Dokumentasi pengukuran	63
Gambar 3.1.8 6. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap	63
Gambar 3.1.8 7. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks PPI Manggar.....	64
Gambar 3.1.8 8. Dokumentasi Pengukuran.....	64
Gambar 3.1.8 9. Workshop Penilaian E-PANJL	64

Gambar 3.1.8 10. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan III	65
Gambar 3.1.9 1. Pemeriksaan Surat Rekomendasi	68
Gambar 3.1.9 2. Pemeriksaan SAJI	69
Gambar 3.1.9 3. Penandaan Arwana	69
Gambar 3.1.9 4. Pemeriksaan keberangkatan	70
Gambar 3.1.9 5. Grafik Pendapatan PNBP	70
Gambar 3.1.9 6. Survei Pemanfaatan Arwana	71
Gambar 3.1.9 7. Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang	71
Gambar 3.1.9 8. Diskusi Morfometrik Arwana	72
Gambar 3.1.9 9. Pemantauan dan Peninjauan Bisnis Proses Ekspor Jenis Ikan Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan	73
Gambar 3.1.10 1. Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kalimantan Barat	75
Gambar 3.1.10 2. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III	76
Gambar 3.1.11 1. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya.....	79
Gambar 3.1.11 2. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang.....	79
Gambar 3.1.11 3. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut.....	80
Gambar 3.1.11 4. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan.....	80
Gambar 3.1.11 5. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang.....	80
Gambar 3.1.11 6. Gerakan Bersih sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah	81
Gambar 3.1.11 7. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III	82
Gambar 3.1.12 1. Tren Nilai IKPA Tahun 2024.....	84
Gambar 3.1.12 2. Tren Nilai IKPA Triwulan III	84
Gambar 3.1.12 3. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III	88
Gambar 3.1.12 4. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III	92
Gambar 3.1.12 5. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III	96
Gambar 3.1.12 6. Kegiatan pleno Evaluasi AKIP	100
Gambar 3.1.12 7. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III	100
Gambar 3.1.12 8. Nilai MP BPSPL Pontianak.....	104
Gambar 3.1.12 9. Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK.....	111
Gambar 3.1.12 10. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III	112

Daftar Tabel

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023.....	11
Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023.....	12
Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPSPL Pontianak Tahun 2024.....	14
Tabel 3.1.1 1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak.....	22
Tabel 3.1.1 2 Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Triwulan III.....	23
Tabel 3.1.2 1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak.....	24
Tabel 3.1.2 6. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan III.....	29
Tabel 3.1.3 1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak.....	30
Tabel 3.1.3 2. Jumlah Verifikasi Teknis KKPRL Triwulan III.....	31
Tabel 3.1.3 3. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan III.....	33
Tabel 3.1.4 1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap Kriteria.....	34
Tabel 3.1.4 2. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA.....	35
Tabel 3.1.4 3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	35
Tabel 3.1.4 4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak.....	35
Tabel 3.1.4 5. Hasil Pengamatan Kemunculan Pesut.....	39
Tabel 3.1.4 6. Hasil Kualitas Air di Kawasan Mahakam Hulu.....	40
Tabel 3.1.4 7. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan III.....	42
Tabel 3.1.5 1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak.....	44
Tabel 3.1.5 2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan III.....	46
Tabel 3.1.6 1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak.....	47
Tabel 3.1.6 2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan III.....	49
Tabel 3.1.6 3. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak.....	50
Tabel 3.1.7 1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak.....	53
Tabel 3.1.7 2. Realisasi IKU 8 Triwulan III.....	56
Tabel 3.1.7 3. Realisasi IKU 9 Triwulan III.....	58
Tabel 3.1.8 1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak.....	59
Tabel 3.1.8 2. Realisasi IKU 10 Triwulan III.....	65
Tabel 3.1.9 1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak.....	66
Tabel 3.1.9 2. Realisasi IKU 11 Triwulan III.....	73
Tabel 3.1.10 1. Capaian IKU 12 PNBP BPSPL Pontianak.....	74
Tabel 3.1.10 2. Capaian IKU 12 Triwulan III.....	76
Tabel 3.1.11 1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak.....	77
Tabel 3.1.2 6. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan III.....	81
Tabel 3.1.12 1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak.....	83
Tabel 3.1.12 2. Realisasi Anggaran IKM 14 Triwulan III.....	87
Tabel 3.1.12 3. Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak.....	89
Tabel 3.1.12 4. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak.....	90
Tabel 3.1.12 5. Realisasi Anggaran IKM 16 Triwulan III.....	92
Tabel 3.1.12 6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak.....	93
Tabel 3.1.12 7. Realisasi Anggaran IKM 17.....	95
Tabel 3.1.12 8. Kategori Nilai PM SAKIP.....	96
Tabel 3.1.12 9. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak.....	97
Tabel 3.1.12 10. Komponen Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP.....	98
Tabel 3.1.12 11. Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan III.....	100
Tabel 3.1.12 12. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak.....	101
Tabel 3.1.12 14. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Triwulan III.....	103

Tabel 3.1.12 15. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak.....	104
Tabel 3.1.12 16. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak.....	106
Tabel 3.1.12 17. Capaian IKM 22 BPSPL Pontianak.....	108
Tabel 3.1.12 18. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah.....	109
Tabel 3.1.12 19. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak.....	110
Tabel 3.1.12 20. Realisasi Anggaran IKM 23 Triwulan III	111
Tabel 3.1.12 21. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan.....	112
Tabel 3.1.12 22. Capaian IKM 24 BPSPL Pontianak.....	113
Tabel 3.1.12 23. Tabel nilai pengawasan kearsipan.....	113
Tabel 3.1.12 24. Realisasi Anggaran IKM 24 Triwulan III	114
Tabel 3.1.12 1. Perbandingan Capaian Kinerja BPSPL Pontianak dengan Unit Kerja Lain ..	111
Tabel 3.23.1.12 1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan III	113
Tabel 3.1.122 3.1.12 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024	114

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Adapun peraturan lebih lanjut terkait kedudukan, tugas, dan fungsi BPSPL Pontianak yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) No. 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

1.1.1. Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dipimpin oleh kepala. BPSPL Pontianak sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

1.1.2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu sejak terbitnya Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan yaitu melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

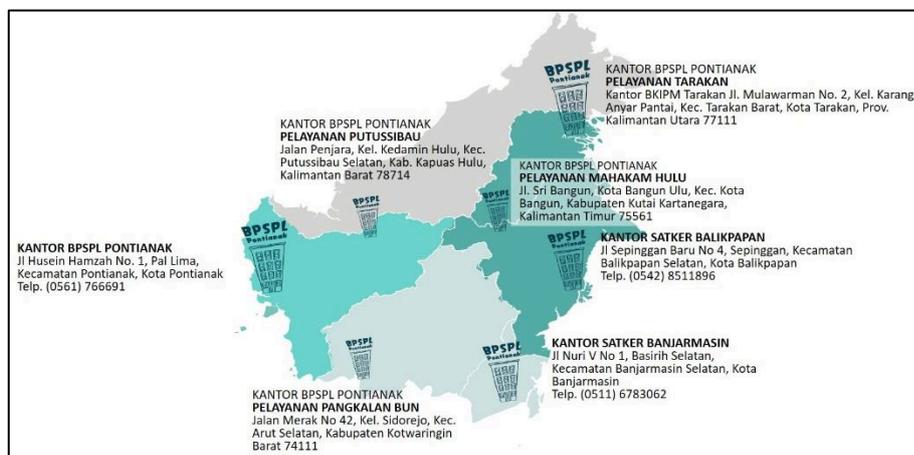
- g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
- c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional;
- d. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (*Convention on Biological Diversity*), *Ramsar Convention on Wetlands of International Importance*, WHS (*World Heritage Site*), dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah;
- e. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- f. Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
- g. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Permen KP No. 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut menjelaskan Lokasi, Satuan Kerja, dan Wilayah Kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat dengan satuan kerja di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Adapun wilayah kerja BPSPL Pontianak meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Untuk lebih jelas dapat melihat peta di bawah ini.

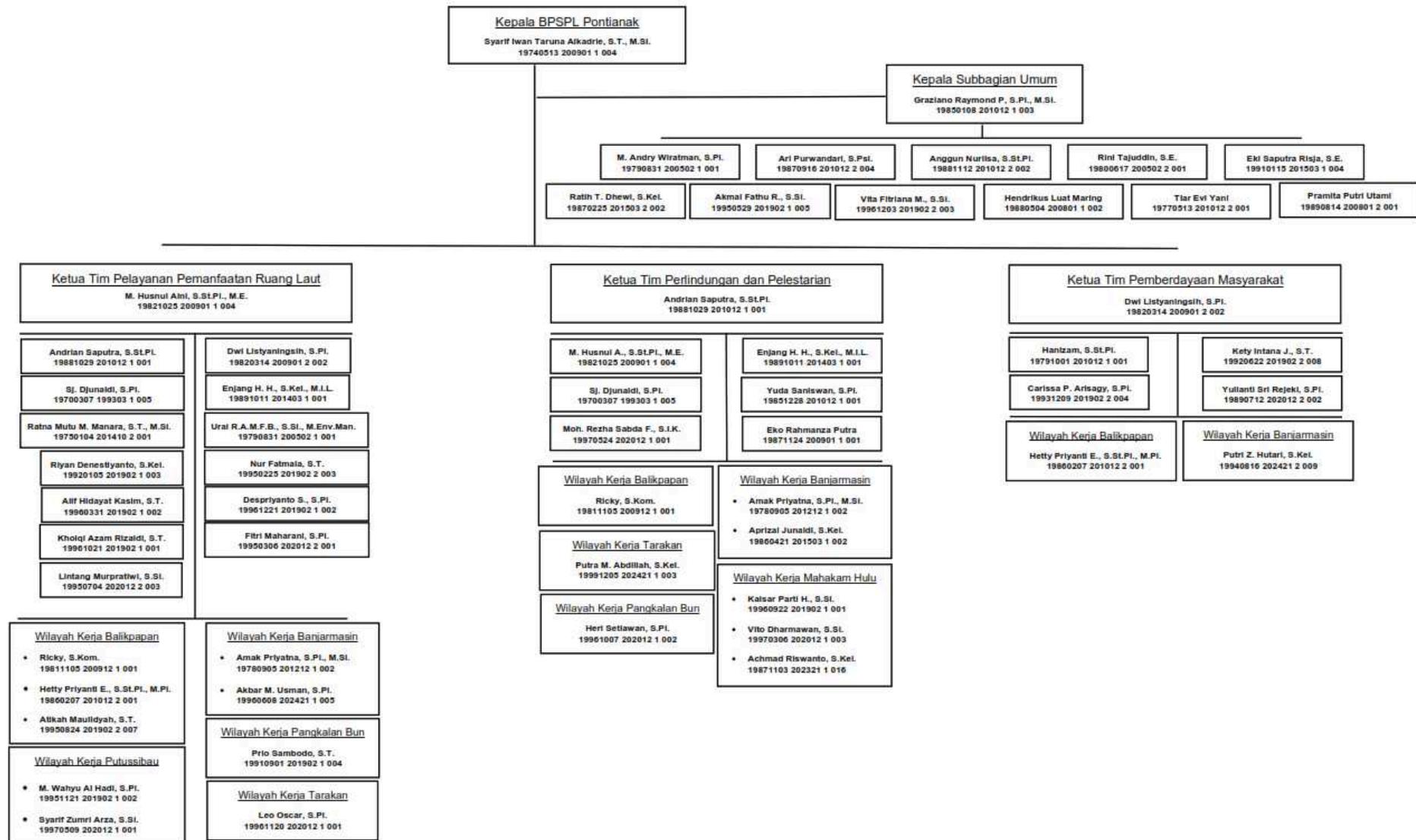


Gambar 1.1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak, dipimpin oleh seorang kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK), Perencana, Analisis Pengelolaan Keuangan (APK) APBN, Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), Arsiparis, dan Statistisi.

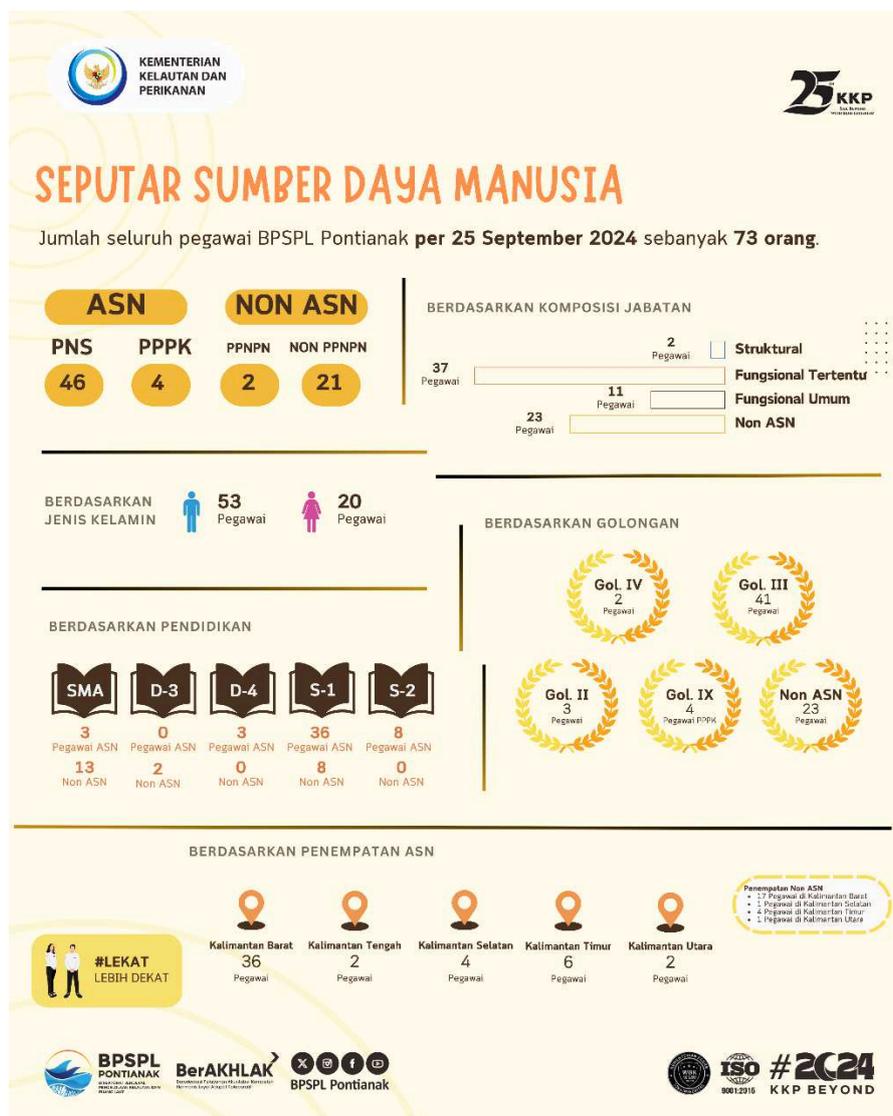
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim kerja tersebut terdiri dari: (1) Tim Kerja 1, menangani Perlindungan dan Pelestarian, (2) Tim Kerja 2, menangani Pemberdayaan Masyarakat, (3) Tim Kerja 3, menangani Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain 3 (tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajerial yang melaksanakan Indikator Kinerja Manajerial yang diketuai oleh Kepala Subbagian Umum.



Gambar 1.1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak

1.3. Keragaman SDM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada Triwulan III Tahun 2024 memiliki jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 73 orang terdiri dari 50 ASN (46 PNS dan 4 PPPK), 2 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 21 Pegawai Non ASN. Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Adapun rincian Pegawai Non ASN yang berjumlah 21 orang merupakan Sekretaris Pimpinan, Petugas Keamanan, Pramubakti, Pengemudi, dan Enumerator Kelautan dan Perikanan. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Pontianak. Adapun keragaman Sumber Daya Manusia (SDM) di BPSPL Pontianak terangkum dalam infografis di bawah ini.



Gambar 1.1.3-3. Komposisi SDM BPSPL Pontianak

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1.4.1. Potensi

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 542.430,35 km² terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 30 Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 9.790,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 778 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

1.4.2. Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- a. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara mata darat dan mata laut yang diwujudkan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang/zonasi. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang laut, diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
- b. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- c. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora*. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.
- d. Masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat.
- e. Ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini dilakukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang begitu rentan dengan bencana alam diperlukan penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- f. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.
- g. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

- h. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024 disusun dengan dasar hukum:

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara keseluruhan. Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

- i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Alternatif solusi yang telah dilakukan;
- vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- vii. Kegiatan Pendukung.
- viii. Realisasi Anggaran
- ix. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020 - 2025 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budi daya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, menyusun Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”. Dengan demikian Visi BPSPL Pontianak adalah **“Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL”**.

2.1.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Pada tahun 2024 Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan untuk kegiatan prioritas yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, BPSPL Pontianak mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Pontianak.

2.1.3. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, BPSPL Pontianak merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Perencanaan Ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
 - b. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Misi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Tujuan meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Meningkatnya pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
3. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - b. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - c. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - d. Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang: sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran, lokasi, program, dan kegiatan. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Dokumen RKT 2024 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah berbasis pada *Balanced Scorecard (BSC)*. PK BPSPL Pontianak ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak dengan Dirjen PRL. Pada tahun 2024 BPSPL Pontianak memiliki 12 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja (13 IKU dan 11 IKM). Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Sasaran Kegiatan Tahun 2024
(SK-1) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-1) Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak
-	(SK-2) Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-2) Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-3) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-3) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-4) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-4) Meningkatnya efektivitas Kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-5) Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-5) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-6) Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-6) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-7) Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-7) Meningkatnya nilai PNBP BPSPL Pontianak	(SK-8) Meningkatnya jejaring dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-8) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	(SK-9) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-10) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-11) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-12) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak

Sumber data: BPSPL Pontianak, Maret 2023 dan Maret 2024

Sedangkan untuk perubahan IKK pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

IKK	IKK
Tahun 2023	Tahun 2024
(IKU-1) Rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Rekomendasi Kebijakan)	Tidak digunakan, diganti dengan (IKU-1) Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)
(IKU-2) Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	Tidak digunakan
Tidak Terdapat IKU	(IKU-2) Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Daerah)
(IKU-3) Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	(IKU-3) Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)
Tidak Terdapat IKU	(IKU-4) Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)
(IKU-4) Jenis Ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	(IKU-5) Jenis Ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
(IKU-5) Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	(IKU-6) Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
(IKU-6) Nilai PNBSP BPSPL Pontianak (Rp)	(IKU-7) Nilai PNBSP BPSPL Pontianak (Rp000)
(IKU-7) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKM-8) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKU-8) Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKM-9) Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IK-9) Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKM-10) Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)
Tidak Terdapat IKU	(IKM-11) Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BPSPL Pontianak (Inovasi)
(IK-10) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	(IKM-12) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)
(IK-11) Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	Tidak digunakan, diganti dengan (IKM-13) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

IKK	IKK
Tahun 2023	Tahun 2024
(IK-12) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	(IKM-14) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
(IK-13) Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	(IKM-15) Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
(IK-14) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	(IKM-16) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
(IK-15) Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)	(IKM-17) Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)
(IK-16) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	(IKM-18) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)

Sumber data: BPSPL Pontianak, November 2023 dan Maret 2024

Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak	1.	Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000)	2.000.000
2.	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2.	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	320
3.	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3.	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	3
4.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4.	Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	14
5.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5.	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6. Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
		7. Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
7.	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	2
		9. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok)	1
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	10. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
9.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	11. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4
10.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	12. Pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
11.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	13. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	4
12.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	93,76
		15. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	86

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)	75
	17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	88
	18. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	81
	19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4
	20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
	21. Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
	22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Pontianak (%)	100
	23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	80
	24. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	65

Sumber data: BPSPL Pontianak - DJPKRL, Maret 2024

2.3. Metode Pengukuran Kinerja

2.3.1. Rumusan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scored Card (BSC).

2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam memantau perkembangan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulanan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik;
- b. Pengukuran Kinerja dilakukan dari bawah keatas (level IV sampai ke level 0); dan
- c. Pencapaian Kinerja atasan merupakan akumulasi/rata-rata/kontribusi/adopsi langsung dari pencapaian kinerja bawahannya.

2. Syarat Pengukuran Kinerja

Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas PK, manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dukungan sistem informasi.

3. Manual IKU

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi karakteristik IKU, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
2. Menghitung Realisasi IKU
3. Mengalikan dengan bobot validasi IKU
4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (<http://kinerjaku.kkp.go.id/app/>)
5. Atasan langsung dari setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliabel dan obyektif.
6. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat level I dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Manual IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
9. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja level I kepada masing-masing pimpinan unit kerja dibawahnya paling lambat 5 hari setelah periode triwulanan/tahunan berakhir.

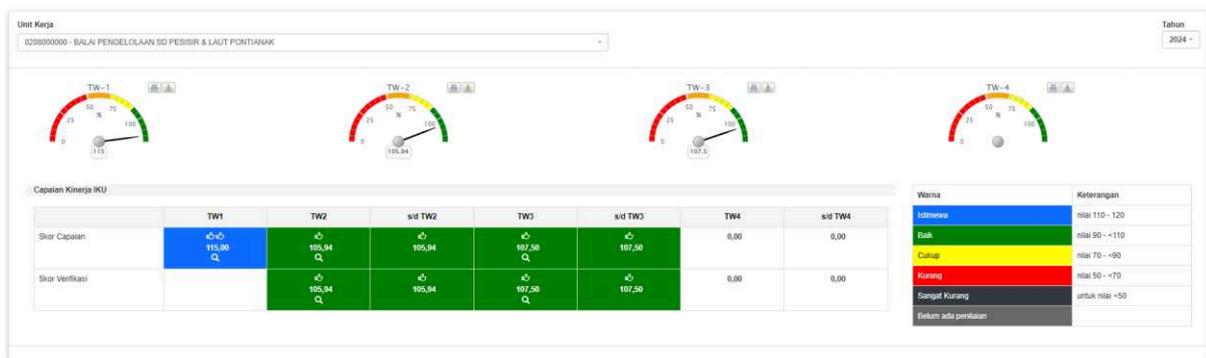
Capaian kinerja triwulanan dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi penanggungjawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PRL. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sesditjen PRL merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKU dan IKM). Perhitungan IKU dan IKM diukur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara *online* yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.



Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **IKU+IKM** BPSPL Pontianak pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu **107,50%** (masuk kategori Hijau = **Baik**). NKO mengalami peningkatan sebesar 1,56% dari Triwulan II. NKO IKU pada Tahun 2023 (Triwulan III) sebesar 111,11%. Terdapat penurunan 3,56% dari Triwulan III Tahun 2023. Penurunan nilai disebabkan karena penurunan capaian dari target dan bertambahnya target dalam perhitungan tahunan. Dari 24 Indikator Kinerja Kegiatan, hanya 4 Indikator yang memiliki periode penilaian Triwulan III. Terdapat 4 Indikator Kinerja yang tercapai telah tercapai seluruhnya. Secara singkat capaian kegiatan pada Triwulan III dapat dilihat pada infografis di bawah ini.

CAPAIAN KINERJA BPSPL PONTIANAK TRIWULAN III TAHUN 2024



Gambar 3.1.1-2. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan III

CAPAIAN KINERJA BPSPL PONTIANAK TRIWULAN III TAHUN 2024



Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan III

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak IKU 1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Pontianak adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, berupa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya serta penerimaan dari sumber lain.

Teknik Menghitung:

Nilai PNBP 2024 = Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) + Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) + Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) yang diperoleh dari Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

$$PNBP_{BPSPL\ Pontianak} = PNBP_{Layanan} + PNBP_{BMN} + PNBP_{Lainnya}$$

dimana,

$$PNBP_{Layanan} = SAJI\ DN + Surat\ Rekomendasi\ DN + Surat\ Rekomendasi\ LN + Denda$$

Keterangan:

SAJI DN = Pungutan atas Dokumen SAJI DN¹⁾ + Pungutan Perdagangan + Pungutan Pengambilan²⁾

Surat Rekomendasi = Pungutan atas Dokumen Rekomendasi + Pungutan Perdagangan

$PNBP_{Layanan}$ = Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya dan Jasa Kelautan dan Perikanan

$PNBP_{BMN}$ = Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

$PNBP_{Lainnya}$ = Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut.

Keterangan:

1) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 25%

2) dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang dimiliki

Formulasi Penghitungan Pungutan

Pungutan Pengambilan = Jumlah Individu x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan

Pungutan Perdagangan = Volume x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan

Denda = Tarif PNBP x Jumlah Produk yang Tidak Sesuai dengan Permohonan

Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

SK-1	Meningkatnya Nilai PNBSP BPSPL Pontianak									
IKU-1	Nilai PNBSP BPSPL Pontianak (Rp000)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW III	.Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
2.374.620.820	Periode Capaian Tahunan			2.000.000	0	-	-	-	-	

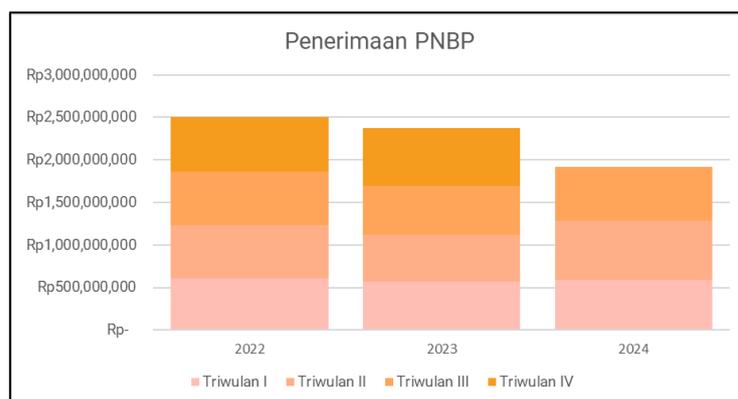
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian nilai PNBSP Triwulan III (per tanggal buku 1 Januari – 30 September 2024) yaitu senilai Rp1.928.745.152 atau 96,44% dari target tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Namun untuk progres nilai PNBSP Triwulan III tahun 2024 (Rp1.928.745.152) mengalami peningkatan sebesar 113,66% jika dibandingkan dengan progres nilai PNBSP Triwulan III tahun 2023 (Rp1.696.854.785).



Gambar 3.1.1-1. Tren Capaian PNBSP dari Tahun 2022

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024. Capaian kinerja triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra Ditjen PRKL Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, namun pada tahun 2024 terdapat target sebesar Rp 2.000.000.000,-. Capaian kinerja triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak

Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024. Namun, progres nilai PNBP Triwulan III tahun 2024 telah berkontribusi sebesar 96,44% dari target tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan III sebesar 96,44% dari target tahunan. Hal itu didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PNBP. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMPONI untuk menerbitkan dan memvalidasi PNBP yang diterima.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) selama bulan Juli – September 2024. Selain itu, ada pula pungutan PNBP dari sewa Gedung dan Bangunan. Berikut ini merupakan rincian pungutan PNBP hingga Triwulan III 2024.

Tabel 3.1.1-2 Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Triwulan III

Jenis PNBP	Juli	Agustus	September
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp166.667	Rp333.334	Rp333.334
Pendapatan Perizinan Lainnya	Rp115.020.000	Rp108.135.000	Rp114.345.000
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	Rp98.691.815	Rp95.567.925	Rp100.451.300
Jumlah	Rp213.878.482	Rp204.036.259	Rp215.129.634
Total TW III			Rp633.044.375

8. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian target IKU pada Triwulan III Tahun 2024 tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Pelayanan operasional perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan Oktober – Desember 2024, pemungutan PNBP untuk layanan dan izin yang diterbitkan oleh BPSPL Pontianak, serta pemungutan PNBP dari Sewa Gedung dan Bangunan.

3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun nonfisik. Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

Teknik Menghitung

$$TK_{\text{BPSPL Pontianak}} = TK_{\text{Lokasi 1}} + TK_{\text{Lokasi 2}} + TK_{\text{Lokasi 3}} + TK_{\text{Lokasi 4}}$$

Keterangan:

$TK_{\text{BPSPL Pontianak}}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak

$TK_{\text{Lokasi 1,2,3,4}}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di lokasi yang menjadi target pada tahun 2024

Tabel 3.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak

SK-2	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak									
IKU-2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
-	Periode Capaian Tahunan			320	0	-	-		-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 diantaranya: Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak, Evaluasi dan Penutupan Akbar Bulan Cinta Laut di Kota Makassar, Monitoring Sampah Laut di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang, Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kabupaten Sambas. Progres jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Bulan Cinta Laut sampai dengan bulan Juni 2024 sebanyak 320 nelayan tradisional (100% dari target sebesar 320 orang) yang tersebar merata sebanyak masing-masing 80 orang di empat lokasi Bulan Cinta Laut.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat IKU “Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak”. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPRL 2020-2024 yaitu sebanyak 5 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan III belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan *stakeholder* terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan mengikuti kegiatan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan III yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dilakukan pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 8 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 60 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya selama 8 (delapan) minggu telah mengumpulkan sebanyak 23,7 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 7,18 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomis sejumlah Rp4.863.000.



Gambar 3.1.2-1. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

b. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapak Besar sebanyak 28 orang, Kel. Naram sebanyak 22 orang dan Kel Kuala sebanyak 20 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang telah mengumpulkan 11,9 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 6,87 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp10.525.800.



Gambar 3.1.2-2. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

c. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 76 orang dan Desa Bawah Layung sebanyak 6 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Baiman Banjarmasin. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Tanah Laut telah mengumpulkan sebanyak 4,8 ton sampah dengan sampah yang bernilai ekonomis sebesar Rp4.196.950.



Gambar 3.1.2-3. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

d. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggian sebanyak 80 orang). Kegiatan ini juga bemitra dengan Bank Sampah Kota Hijau. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan telah mengumpulkan sebanyak 38,84 ton sampah dengan nilai insentif sampah untuk nelayan sebesar Rp211.161.700.



Gambar 3.1.2-4. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

e. Monitoring Sampah Pesisir dan Laut di Kota Singkawang

Monitoring sampah pesisir dan laut dilakukan pada tanggal 9 – 12 September 2024 di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk memantau kondisi sampah yang ada di pesisir dan laut sekitarnya pasca pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut. Metode survei yang digunakan yaitu dengan menarik garis transek dan memantau jumlah sampah pada tiga lokasi sampling: Pantai Singka Island Park, Pantai Kuala Singkawang dan Pantai Viral. Pada masing-masing lokasi terkumpul sampah sebanyak 1,348 kg di Pantai Singka; 7,887 kg di Pantai Kuala Singkawang; dan 0,619 kg sampah di Pantai Viral. Jenis sampah yang ditemukan di ketiga lokasi tersebut yaitu plastic, karet, foam/busa, kertas, kain, kaca dan logam.



Gambar 3.1.2-5. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang

f. Bersih Pantai dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kab. Sambas

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2024 dalam rangka menghadiri Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dari Stasiun PSDKP Pontianak melalui kegiatan bersih pantai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi sampah yang ada di pesisir Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Temajuk dan Desa Sebusus. Kegiatan bersih pantai dihadiri oleh PSDKP Pontianak, Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sambas, TNI dan POLRI, POKMASWAS dan pelajar setempat. Sampah yang berhasil dikumpulkan oleh peserta didapatkan sebanyak 1,4 ton yang terdiri dari sampah plastik sisa kemasan makanan, bungkus rokok, puntung rokok, botol minum plastik, botol minum kaca, kaleng biskuit dan lain sebagainya.



Gambar 3.1.2-6. Gerakan Bersih sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah

Identifikasi lokasi monitoring sampah dilakukan di Pantai Camar Bulan, Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan monitoring sampah yaitu di Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut berupa sampah sisa kemasan makanan dan minuman, botol lotion dan puntung rokok. Terdapat sampah kemasan yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

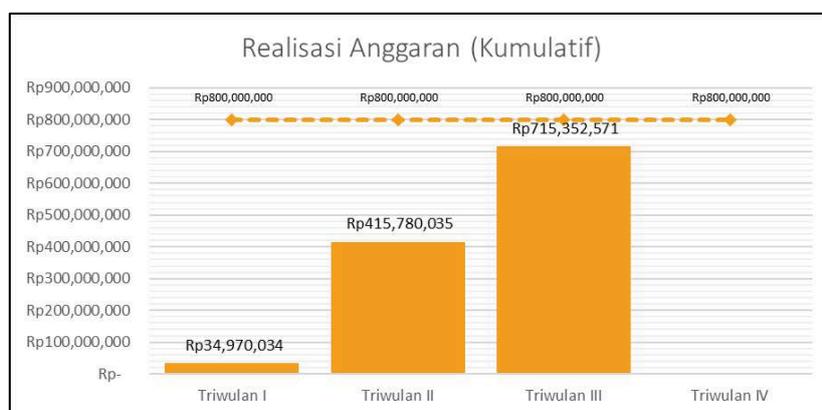
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD.001] Fasilitasi Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[4346.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp800.000.000	Rp715.352.571 (89,42%)	-
TOTAL		Rp800.000.000	Rp715.352.571 (89,42%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp715.352.571 atau 89,42% dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini.



Gambar 3.1.2-7. Realisasi Anggaran IKU II Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bulan Oktober – Desember yaitu menyusun laporan kegiatan Bulan Cinta Laut yang telah dilaksanakan.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 3. Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang eksisting, dan/atau verifikasi perizinan. Teknik menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi dan verifikasi, sosialisasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak

SK-3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-3	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW III	.Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	Periode Capaian Tahunan			3	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 diantaranya: koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pemanfaatan ruang laut, monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak, verifikasi lapangan permohonan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebanyak 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020-2024 yaitu persentase penyelesaian perizinan sebesar 100% di tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, namun pada tahun 2024 terdapat target sebesar 3 Dokumen. Capaian kinerja Triwulan III belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun berupa dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut. Hal ini disebabkan saat ini telah terbit regulasi terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi subjek pemanfaatan ruang laut. Selain itu, BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Stasiun PSDKP Pontianak dan Stasiun PSDKP Tarakan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NKO belum dapat dihitung. Perhitungan analisis

efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NKO, realisasi anggaran dan selisih dari NKO dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan melakukan penilaian teknis secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan III yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Pada Triwulan III, pendampingan dalam verifikasi teknis PKKPRL telah dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut kepada 33 pemohon pemanfaatan ruang laut di wilayah Kalimantan. Verifikasi teknis KKPRL terbanyak dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 30 pemohon, sementara verifikasi teknis paling sedikit dilakukan di Kalimantan Selatan sebanyak tiga pemohon.

Tabel 3.1.3-2. Jumlah Verifikasi Teknis KKPRL Triwulan III

Provinsi	Jumlah Pemohon	Waktu Pelaksanaan
Kalimantan Timur	30	Juli - September
Kalimantan Selatan	3	Juli & September
Total	33	Juli - September

Kegiatan ini juga didukung lebih lanjut dengan Penilaian teknis secara luring di Kota Balikpapan pada tanggal 4 – 6 September 2024. Penilaian teknis dan verifikasi lapangan yang telah dilaksanakan diantaranya untuk Permohonan KKPRL Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Persekutuan dan Perkumpulan Kelompok Nelayan Budidaya Ibu, dan Permohonan Resort a.n. Indra Mahardika.



Gambar 3.1.3-1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL

b. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Telah dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk pelaku pemanfaatan ruang laut sebanyak 27 subjek yang berada di Kalimantan Selatan (4 Subjek), Kalimantan Timur (22 Subjek) dan Kalimantan Barat (1 Subjek).



Gambar 3.1.3-2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

c. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 14 Juli 2024 di Hotel Maestro Pontianak. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai perizinan pemanfaatan ruang laut pada Nelayan di Provinsi Kalimantan Barat, Universitas Muhammadiyah Pontianak serta instansi terkait lainnya. Narasumber dari kegiatan ini berasal dari Staf Ahli Menteri KP Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat; Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Disampaikan bahwa berdasarkan mandat UUCK kewenangan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut berada di Pemerintah Pusat. Peranan dari pemerintah daerah adalah hasil penataan ruang daerah berupa RTRW Provinsi digunakan sebagai dasar penerbitan Persetujuan KKPRL. Upaya menjaga kelestarian lingkungan laut dengan penerbitan persetujuan KKPRL diberlakukan 16 kewajiban bagi pemegang KKPRL untuk melestarikan biota laut dan ekosistem pesisir/laut; pemberdayaan masyarakat; dan menghormati kepentingan bersama antar pemanfaatan ruang laut salah satunya adalah nelayan. Jadi tidak ada privatisasi untuk area pemegang persetujuan KKPRL karena diatur kewajiban memberikan akses nelayan.



Gambar 3.1.3-3. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

d. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung IKU ini diantaranya: rapat evaluasi kegiatan tahun 2024 dan rencana usulan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut pada tanggal 25 s.d. 28 Juli 2024; koordinasi ke Direktorat PRL pasca Penilaian Teknis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tanggal 13 – 14 September 2024.

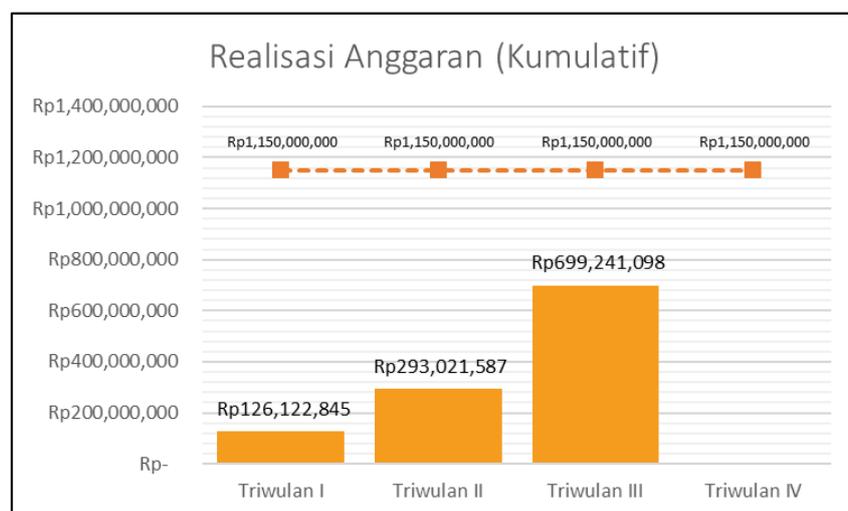
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2366.PBT.009] Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.3-3. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2366.PBT.009.051] Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp195.810.000	Rp64.651.290 (33,02%)	-
2.	[2366.PBT.009.052] Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Rp354.190.000	Rp203.822.133 (57,55%)	-
3.	[2366.PBT.009.053] Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 600.000.000	Rp430.767.675 (71,79%)	-
TOTAL		Rp 1.150.000.000	Rp699.241.098 (60,80%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp699.241.098 atau 60,80% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.150.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Sewa.



Gambar 3.1.3-4. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 hingga Triwulan III

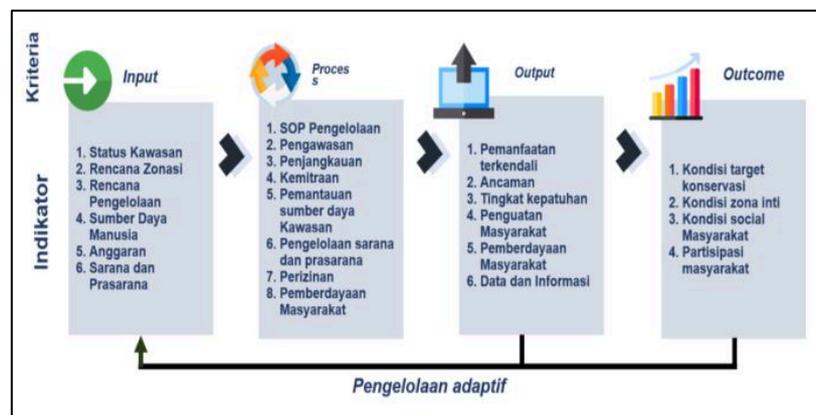
9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, melakukan verifikasi teknis permohonan KKPRL lanjutan untuk bulan Oktober – Desember, serta melakukan monitoring dan identifikasi pemanfaatan ruang laut. Selain itu penyusunan laporan kegiatan direncanakan pada Triwulan III.

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah Nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi. Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolannya seluas 42.667,99 Hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan. Nilai tersebut dapat tercapai setelah dilakukan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dengan mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEPDJPKRL/2020. Aspek penilaian EVIKA yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output* dan *outcome*.



Gambar 3.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA

Tabel 3.1.4-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap Kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	6	10-25	9
Proses	8	10-25	12
Output	6	15-20	13
Outcome	4	20-30	8
Total	24		42

Tabel 3.1.4-2. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA

Kriteria	Ni	Nmax	NK (%)	BK	Nak (%)
Input	...	1075	...	0,25	...
Proses	...	430	...	0,35	...
Output	...	650	...	0,25	...
Outcome	...	625	...	0,15	...
Nilai Akhir Evaluasi					

Keterangan:

- Nilai Indikator (Ni) : Hasil penjumlahan skor pada setiap indikator
- Nilai Maksimum (nMax) : Total nilai dari seluruh pertanyaan
- Nilai Kriteria (NK) : $Ni / nMax \times 100\%$
- Bobot Kriteria (Bk) : Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
- Nilai Akhir Kriteria (Nak) : $Nk \times Bk$
- Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan Nak

Tabel 3.1.4-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50-85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Tabel 3.1.4-4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak

SK-4	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-4	Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	.Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
36,44	Periode Capaian Tahunan			14	-	-	-	17,8 jt Ha	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, berdasarkan Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan pada tanggal 7 Agustus 2024, Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Hulu mendapatkan nilai akhir sebesar 52,75% dengan status Perak (Dikelola Optimum). Nilai EVIKA BPSPL Pontianak mengalami peningkatan sebesar 16,31% dan telah mencapai target Perjanjian Kinerja sebesar 14% dengan persentase capaian sebesar (116%). Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024

diantaranya: penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi, *Conservation Goes to School*, sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi, survey ikan ekonomis penting, survey sosial ekonomi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 36,44%, lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 14%. Hal itu karena target tahun ini merupakan peningkatan nilai EVIKA, sehingga target nilai EVIKA kumulatif pada tahun ini sebesar 50,44%. Namun, berdasarkan hasil penilaian EVIKA pada tanggal 7 Agustus 2024, didapatkan nilai EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu sebesar 52,75% sehingga terdapat peningkatan nilai EVIKA sebesar 16,31%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target jangka menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan sebesar 17,8 juta Ha di tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun. Selain itu, satuan yang digunakan dalam pengukuran kinerja berbeda dengan target Renstra Ditjen PKRL sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun, pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu seluas 42.000 hektar berkontribusi terhadap target pengelolaan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 30% di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Target tersebut sudah tercapai di tahun 2023 yaitu dengan nilai EVIKA sebesar 36,44%. Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun. Namun, berdasarkan hasil penilaian EVIKA pada tanggal 7 Agustus 2024, didapatkan nilai EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu sebesar 52,75% sehingga telah melebihi target dalam Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Perlu upaya peningkatan koordinasi dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Selain itu, perlu peningkatan alat penunjang survei terutama dalam monitoring Pesut Mahakam. Kendala tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kawasan konservasi. Terdapat kendala pada pelaksanaan perizinan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Mahakam Hulu yang belum dapat dilakukan. Hal itu dikarenakan belum terdapat aturan mengenai perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah perairan darat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan III yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi

Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2024 di Kota Samarinda. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Ditjen PKRL dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi yaitu BPSPL Pontianak. Hasil penilaian disepekatkan sebagai berikut:

- Skor penilaian kriteria input: 760 dari total 1075 (71%)
- Skor penilaian kriteria proses: 265 dari total 430 (62%)
- Skor penilaian kriteria output: 295 dari total 650 (45%)
- Skor penilaian kriteria outcome: 1410 dari total skor 2780 (52,75%)



Gambar 3.1.4-2. Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan pada tahun 2024 mempunyai nilai akhir sebesar 52,75% dengan status Perak (Dikelola Optimum). Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan status Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Mahakam Hulu diantaranya sebagai berikut: meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM, melengkapi sarana dan prasarana untuk pengukuran dan pemantauan Kawasan, Menyusun dan melengkapi SOP pengelolaan beserta penerapannya, meningkatkan intensitas pengawasan dengan melibatkan kelompok masyarakat, melakukan program penjangkauan yang terencana, pemantauan target konservasi dan sosial ekonomi secara berkala, melakukan koordinasi terkait peraturan yang mengakomodasi perizinan dan pemanfaatan di perairan darat, meningkatkan program pendampingan masyarakat, meningkatkan intensitas program penjangkauan masyarakat, monitoring dan analisis kondisi target konservasi di masing-masing zona.

b. Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Umum

BPSPL Pontianak bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara selenggarakan Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi dan Perairan Umum Daratan. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 23-25 Juli 2024 di Kantor BPSPL Pontianak dan Kantor Stasiun PSDKP Pontianak, serta turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Kalimantan. Pelatihan ini dilaksanakan dalam upaya memperkuat dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal monitoring dan pengawasan Kawasan Konservasi.



Gambar 3.1.4-3. Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan

c. Conservation Goes to School

Kegiatan Conservation Goes to School di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu upaya pembentukan pola pikir, serta pemahaman konservasi dan peduli lingkungan hidup melalui perlindungan dan pelestarian kepada generasi muda di wilayah Kawasan Konservasi. Acara ini telah diselenggarakan di Mtsn 2 Kutai Kartanegara, SMPN 1 Muara Wis, SMPN 1 Muara Kaman dan SMPN 1 Muara Muntai. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Yayasan Konservasi RASI sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang eksistensi Pesut Mahakam. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini generasi mendatang mampu mengelola lingkungan hidup di sekitarnya khususnya sumber daya air dan kehidupan di DAS Mahakam dengan bijak dan menjaga prinsip kelestarian. Sebagai bahan evaluasi, kegiatan diakhiri dengan kuis interaktif bersama siswa dan guru mengenai materi yang telah disampaikan.



Gambar 3.1.4-4. Pelaksanaan Conservation Goes to School

d. Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi

Kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah kepada masyarakat/kelompok masyarakat, Pemerintah Daerah, dan stakeholders terkait dalam rangka upaya pengelolaan, serta penyadartahuan dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Muara Harapan dan Desa Muara Kaman Ilir pada tanggal 2 s.d. 6 September 2024. Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa tujuan dari Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi yaitu untuk perlindungan dan pelestarian ekosistem, habitat dan sumber daya hayati di dalam Kawasan. Adapun zonasi Kawasan konservasi dibagi menjadi Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas, Zona Lainnya dan Zona Rehabilitasi. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Yayasan Konservasi RASI sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang eksistensi Pesut Mahakam yang bernilai strategis secara nasional serta urgensi untuk melindungi habitat pesut. Selain itu, penjangkauan materi

kawasan konservasi dilakukan dalam pemberian bahan cetak dalam bentuk poster dan X-Banner kepada masyarakat yang terdiri dari tamu dan stakeholder.



Gambar 3.1.4-5. Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi

e. Survei Jenis Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengamatan pada populasi pesut mahakam pada periode Juli - September 2024 di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Survei pemantauan keberadaan pesut dilakukan menggunakan kapal Orcaella milik Yayasan Konservasi RASI dimulai pada pukul 08.00 - 18.00 WITA, dengan satu pengamat melakukan pengamatan di atas platform kapal dan tiga pengamat lainnya mengamati dari sisi kapal. Selain itu, juga dilakukan pengambilan data kualitas air di lokasi pengamatan.



Gambar 3.1.4-6. Pengamatan Populasi Pesut

Berdasarkan hasil pengamatan selama delapan hari di atas kapal, didapatkan tujuh kemunculan pesut dengan jumlah individu sebanyak 42 ekor. Individu terbanyak yang diamati berlokasi di Hulu Rimba Ayu sebanyak 14 ekor. Sementara individu paling sedikit diamati di Sungai Kedang Rantau sebanyak dua ekor. Waktu kemunculan pesut sebagian besar terlihat pada sekitar pukul 10 Waktu Indonesia Tengah. Waktu paling pagi ditemukannya pesut yaitu pukul 08.17. Sementara waktu paling sore ditemukannya pesut yaitu pukul 16.37.

Tabel 3.1.4-5. Hasil Pengamatan Kemunculan Pesut

No.	Lokasi Kemunculan	Jumlah Pesut	Waktu	Aktivitas
1.	Sangkaliman	9	12.12	<i>Sighting</i>
2.	Sungai Kedang Rantau	2	16.37	<i>Sighting</i>
3.	Muara Wis	6	17.58	<i>Sighting</i>

4	Hulu Rimba Ayu	14	10.49	<i>Sighting</i>
5	Muara Danau Semayang	5	08.17	<i>Sighting</i>
6	Muara Pela	3	10.01	<i>Sighting</i>
7	Liang Ulu	3	10.39	<i>Sighting</i>

Pada hasil stasiun pengamatan kualitas air menunjukkan bahwa kondisi perairan berada pada baku mutu sungai dan sejenisnya kelas 2 yaitu peruntukan untuk prasarana/sarana rekreasi air dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu tersebut. Pada pengukuran temperatur air yang didapatkan di stasiun pengukuran menunjukkan nilai suhu berkisar antara 20,4 – 31 C. Sementara untuk nilai Oksigen Terlarut berkisar antara 2,7 – 5,2. Nilai pH pada saat observasi didapatkan sebesar 5,8 – 7,25. Sementara nilai TDS berkisar antara 13 – 45 ppm.

f. Monitoring Kualitas Air di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan survei monitoring kualitas air di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan pada periode bulan Juli – September 2024. Monitoring kualitas air dilakukan langsung di 16 titik stasiun. Parameter yang diukur mencakup kecepatan arus, kejernihan, suhu air, konduktivitas, oksigen terlarut, dan total bahan terlarut. Alat yang digunakan yaitu *Water Quality Checker*, kamera dan GPS.



Gambar 3.1.4-7. Survei Kualitas Air Kawasan Mahakam Hulu

Sebagai rujukan, regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil dari monitoring kualitas air dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil monitoring sepanjang Triwulan III tahun 2024 diketahui bahwa hasil parameter perairan sungai Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu berada di dalam ambang kelayakan baku mutu kelas dua merujuk PP Nomor 22 tahun 2021.

Tabel 3.1.4-6. Hasil Kualitas Air di Kawasan Mahakam Hulu

Parameter	Tertinggi	Terendah	Rata-rata
Suhu (oC)	33,5	27,6	23,39
pH	6,89	5,6	6,64
TDS (mg/L)	39,8	13,3	24
DO (m/L)	15,8	2,8	5,57
EC (S/m)	79,4	26,9	43,25
Kuat Arus (m/s)	1,94	0	0,75

g. Pendataan Ikan Ekonomis Penting di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan Survei Ekonomis Penting dilakukan pada tanggal 14 – 15 September 2024 di Desa Muara Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Survei ini merupakan bagian dari Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampel pengambilan data didapatkan dari zona pemanfaatan dan zona inti di dalam KK Mahakam Hulu. Jenis ikan yang dilakukan pengukuran yaitu ikan puyau (*Osteochilus vittatus*) dan ikan lepok (*Ompok miostoma*). Sebanyak 73 ekor ikan puyau dan 15 ekor ikan lepok dilakukan pengukuran meristik yang terdiri dari bobot total, panjang total, panjang hingga pangkal ekor, panjang hingga belahan ekor, jari jari keras pada sirip, jari jari lemah mengeras pada sirip, jari jari lemah pada sirip, perumusan sirip Dorsal, Pectoral, Ventral, Anal, dan Caudal (D-P-V-A-C). Selain itu, pengukuran bobot gonad, dan pemberian kelas.



Gambar 3.1.4-8. Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting

h. Survei Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan survey sosial ekonomi dilaksanakan pada tanggal 9-13 September di Desa Muara Wis dan Desa Muara Muntai Ilir. Metode yang digunakan yaitu wawancara langsung secara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan alat peraga berupa kuesioner. Variabel target adalah pelaku perikanan dan pariwisata sebagai subjek seperti nelayan tangkap, nelayan budidaya, pengolah perikanan, dan sebagainya. Subjek berada di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu dan diambil secara *purposive sampling*, sehingga sampel data dianggap sebagai perwakilan yang representatif dari populasi Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Informasi yang didapatkan oleh responden di antaranya: profil responden, sikap terhadap kawasan konservasi, dukungan terhadap kawasan konservasi perairan, interaksi masyarakat, dampak kawasan konservasi, profil hunian dan properti, mata pencaharian utama, kelompok dan kelembagaan masyarakat, penangkapan dan pemasaran, konsumsi rumah tangga. Hasil akhir diperoleh 32 responden yang memiliki sebaran nelayan tangkap, budidaya, dan pengolah perikanan.



Gambar 3.1.4-9. Survei Sosial Ekonomi

i. Focus Group Discussion Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Mahakam Hulu dilakukan pada tanggal 18 – 20 September 2024 di Desa Muara Wis, Desa Pela dan Desa Liang Ilir. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan menampung usulan terkait pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Hulu. Beberapa permasalahan di Kawasan Konservasi yang disampaikan oleh peserta FGD diantaranya: pendangkalan danau akibat pengerukan tanah, gangguan dari dampak ramainya kapal ponton, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan berkurangnya area tangkap yang termasuk Zona Inti. Usulan program pengelolaan dari masyarakat yaitu penegakkan hukum bagi pengguna alat tangkap tidak ramah lingkungan, restocking benih ikan serta pelatihan pengolahan dan budidaya ikan.



Gambar 3.1.4-10. FGD Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Konservasi

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu dilakukan pada bulan Agustus dan September 2024. Sarana dan prasarana yang disediakan yaitu CCTV dan Rumah Rakit untuk Monitoring Pesut.

8. Realisasi Anggaran

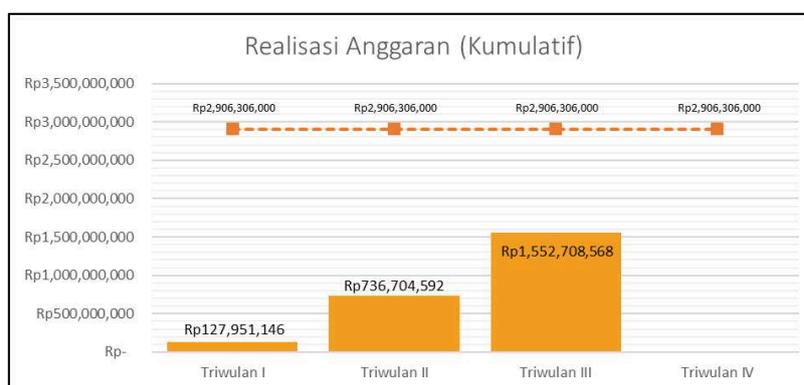
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.PBW.001] Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan [2362.REA.002] Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.4-7. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PBW.001.053] Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan	Rp 83.590.000	Rp83.044.333 (99,35%)	-

	Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil			
2.	[2362.PBW.001.058] Pelayanan Peizinan Berusaha Kawasan Konservasi	Rp128.838.000	Rp0 (0%)	-
3.	[2362.PBW.001.065] Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan	Rp21.257.200	Rp19.973.340 (93,96%)	-
4.	[2362.REA.002.051] Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp593.000.000	Rp397.156.322 (66,97%)	-
5.	[2362.REA.002.052] Data dan Informasi Kawasan Konservasi	Rp444.111.000	Rp200.756.284 (45,20%)	-
6.	[2362.REA.002.053] Pemberdayaan Masyarakat	Rp1.197.913.000	Rp850.699.889 (71,02%)	-
7.	[2362.REA.002.054] Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi	Rp246.282.000	Rp1.078.400 (0,44%)	-
TOTAL		Rp2.906.306.000	Rp1.552.708.568 (53,73%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp1.552.708.568 atau 53,73% dari pagu anggaran sebesar Rp 2.906.306.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan.



Gambar 3.1.4-11. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 4 hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan di Triwulan IV diantaranya: monitoring sosial ekonomi, pendataan jenis ikan ekonomis, survei pemanfaatan kawasan, sosialisasi rencana pengelolaan dan survei biota dilindungi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Selain itu, penyusunan laporan kegiatan juga direncanakan pada Triwulan IV.

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi adalah provinsi yang didampingi penyusunan percepatan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan atau pendampingan lain sesuai kondisi Kawasan Konservasi. Teknik perhitungan Indikator Kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak

SK-5	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak									
IKU-5	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW III	.Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
3	Periode Capaian Tahunan			1	-	-	-	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu melakukan Pendampingan Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 2 daerah, lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 1 daerah.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebesar 29,3 juta Ha di Tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 1 dokumen di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini bergantung oleh keaktifan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pertemuan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2024 yaitu Pendampingan Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Penilaian EVIKA di Kalimantan Utara dilakukan di Kawasan Konservasi Perairan Binusan dan Pulau Sinelak & Kawasan Konservasi Perairan Tanjung Palas Timur. Berdasarkan pertemuan, verifikasi hasil penilaian Kawasan Konservasi yang berada di Kalimantan Utara didapatkan jumlah skor penilaian sebesar 705 dari total skor 2780 (28,31%). Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan Efektivitas Pengelolaan diantaranya: Penetapan dokumen rencana pengelolaan sesuai dengan PERMEN KP No. 31 Tahun 2020; Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Pengelola Kawasan Konservasi; Peningkatan Alokasi Anggaran Pengelolaan Kawasan Konservasi; Penyusunan dan Penerapan SOP Pengelolaan dan Perizinan Berusaha di Kawasan Konservasi; Peningkatan Intensitas Pengawasan dan Pelaporan; Melakukan kegiatan perencanaan dalam hal penjangkauan ke kelompok masyarakat; Peningkatan kegiatan kemitraan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi; Peningkatan kegiatan sosialisasi kepada kelompok masyarakat dengan berkolaborasi dengan akademisi; dan lainnya.



Gambar 3.1.5-1. Fasilitasi Penilaian EVIKA di Kalimantan Utara & Kalimantan Tengah

Sementara itu, penilaian EVIKA di Kalimantan Tengah dilakukan di Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Baras Basah, Teluk Bogam Sampai Tanjung Keluang, Serta Perairan Sekitarnya. Berdasarkan pertemuan, verifikasi hasil penilaian Kawasan Konservasi yang berada di Kalimantan Tengah didapatkan jumlah skor penilaian sebesar 1680 dari total skor 2780 (58,55%). Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan Efektivitas Pengelolaan diantaranya: - Mengusulkan SUOP dalam bentuk UPTD; Dokumen Rencana Pengelolaan perlu disusun kembali dengan menyesuaikan dengan Permen KP No. 31/2020; Perlu ditambahkan jumlah SDM serta ditingkatkan kompetensi pengelola kawasan konservasi sesuai dengan fungsi pengelolaan kawasan konservasi; Rekomendasi penilaian EVIKA agar dijadikan dasar dalam melakukan pengusulan anggaran pengelolaan kawasan

konservasi yang berasal dari APBN, APBD atau sumber pendanaan lainnya; Perlu meningkatkan frekuensi kegiatan di bidang pengawasan minimal 3 bulan 1 kali dengan melibatkan PSDKP dan pihak terkait lainnya serta mendokumentasikan pelaporan dengan baik; Perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan penjangkauan, penyadartahuan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyertakan target populasi masyarakat yang dijangkau dengan baik; Perlu dilakukan kegiatan pendukung perizinan dalam bentuk sosialisasi atau penyadartahuan, pelayanan, materi dan informasi perizinan serta prosedural pemberian ijin penelitian dan lain-lain yang dilakukan di dalam kawasan konservasi.

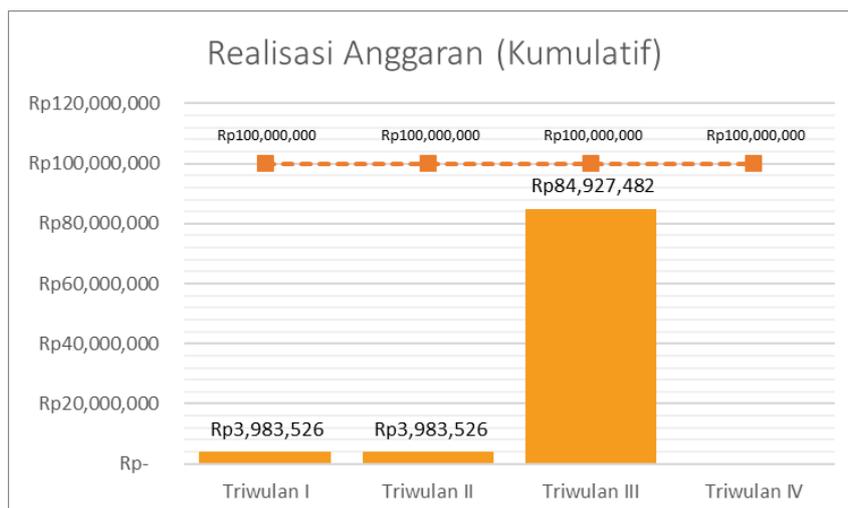
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.UBA.001] Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.UBA.001.051] Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 100.000.000	Rp84.927.482 (84,92%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp84.927.482 (84,92%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp84.927.482 atau 84,92% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.



Gambar 3.1.5-2. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 5 hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi. Selain itu, penyusunan laporan juga direncanakan selesai pada Triwulan IV.

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teknik menghitung indikator kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan draf kesepakatan kerja sama yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

SK-6	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak									
IKU-6	Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
-	Periode Capaian Tahunan			1	100	2	-	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)". Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada Triwulan III, capaian tersebut belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian adalah tahunan. Namun terdapat progress kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan kerja sama, sehingga progress capaian untuk IKU ini sebesar 100%. Progres kegiatan yang dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Nomor 07/DJPKRL/KS.320/V/2024 dan Nomor B-832/KS/KSDN/074.08/05/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)".

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (kumulatif) 19 juta hektar pada 2023 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan

dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan jejaring, kemitraan/kerja sama dan konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun progres kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 50% dari target renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya draf Perjanjian Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, draf tersebut akan disampaikan kepada Sekretariat DJPKRL untuk dilakukan pembahasan lanjutan dan dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh para pihak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III, sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan capaian NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan persentase realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Nomor 07/DJPKRL/KS.320/V/2024 dan Nomor B-832/KS/KSDN/074.08/05/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.



Gambar 3.1.6-1. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.PEC] Kerja Sama, dengan Rincian Output [PEC.001] Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut Berdasarkan Komponen/Subkomponen.

Tabel 3.1.6-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PEC.001.051.A] Penyusunan Kesepakatan Bersama	Rp70.000.000	Rp69.223.671 (98,89%)	-
TOTAL		Rp70.000.000	Rp69.223.671 (98,89%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 6 Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp69.223.671 atau 98,89% dari pagu anggaran Rp70.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Spanduk, Perlengkapan Kegiatan, dan Konsumsi Rapat); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksanaan Kegiatan/Narasumber); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Transpor Peserta).



Gambar 3.1.6-2. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 6 hingga Triwulan III

Output yang telah dicapai pada Triwulan III dengan realisasi anggaran tersebut adalah Kesepakatan Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kesepakatan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2024.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

- Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama oleh Sekretariat DJPKRL, Direktorat lingkup DJPKRL, BPSPL Pontianak, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pihak terkait lainnya.
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

IKU 7. Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Korporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Teknik perhitungan Indikator Kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kesepakatan kemitraan yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.6-3. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

SK-6	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-7	Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	100	2	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU “Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)”. Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada Triwulan III, capaian tersebut belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian adalah tahunan. Namun progress kegiatan telah menghasilkan 1 (satu) kesepakatan kemitraan, sehingga progress untuk capaian IKU ini sebesar 100%. Progres kegiatan yang dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman sesuai Nomor B.1485/BPSPL.2/KS.220/V/2025 dan Nomor B583/UN17.6/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU “Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)”. Sehingga Triwulan III tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (kumulatif) 19 juta hektar pada 2023 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan jejaring, kemitraan/kerja sama dan konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun progres kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 50% dari target renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya Draft Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun draft Perjanjian Kemitraan tersebut telah diajukan permohonan paraf kepada Sekretaris DJPRL dan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III, sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungan capaian NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan persentase realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung dalam Pelaksanaan IKU ini adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman sesuai Nomor B.1485/BPSPL.2/KS.220/V/2025 dan Nomor B583/UN17.6/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.



Gambar 3.1.6-3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan

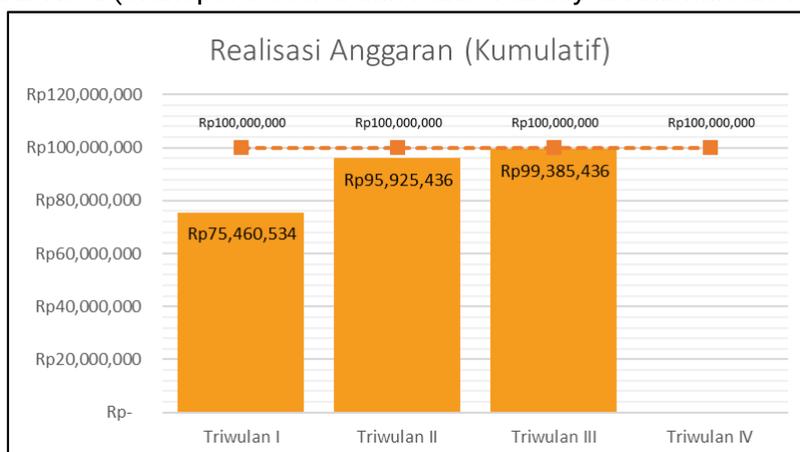
8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.PEC] Kerja Sama, dengan Rincian Output [PEE.001] Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut berdasarkan komponen/subkomponen sebagai berikut.

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PEE.001.051.A] Inisiasi Jejaring dan Kemitraan	Rp100.000.000	Rp99.385.436 (99,38%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp99.385.436 (99,38%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 7 Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp99.385.436 atau 99,38% dari pagu anggaran Rp100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Spanduk, Seminar Kit, dan Bahan Publikasi); Belanja Jasa Profesi (Honorarium Narasumber/Pembahas); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksanaan Kegiatan); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Transpor Peserta dan Paket Fullday di Kalimantan Timur).



Gambar 3.1.6-4. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 7 hingga Triwulan III

Output yang telah dicapai pada Triwulan III dengan realisasi anggaran tersebut adalah Penandatanganan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana Aksi di Triwulan IV Tahun 2024 adalah Penandatanganan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat.

3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Bantuan Konservasi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi. Teknik menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024.

Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak

SK-7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU-8	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	2	2	100	2	100	3	66,67	-	

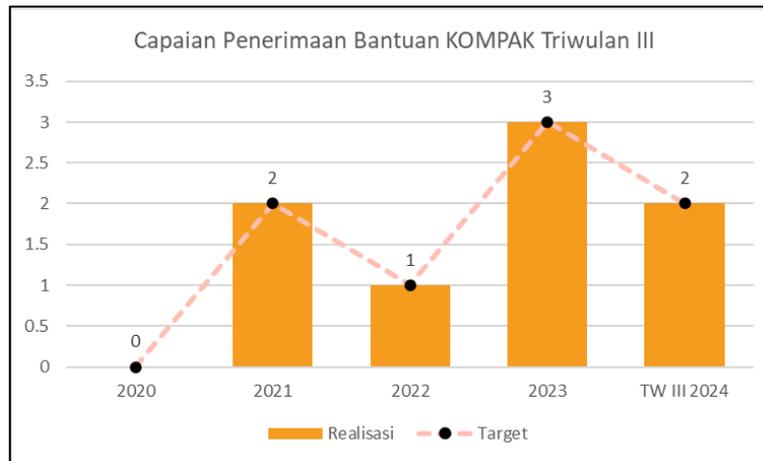
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 telah dilakukan pengukuran dengan capaian sebanyak 1 (satu) Kelompok Masyarakat yang telah diserahkan Bantuan Pemerintah dari target Triwulan III sebesar 1 (kelompok) dan target tahunan sebesar 2 (dua) kelompok, sehingga persentase realisasi terhadap target triwulanan sebesar 100% dan kumulatif terhadap target tahunan sebesar 100%. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu pengadaan dan serah terima bantuan kelompok masyarakat untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Cempedak Lestari di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 3 kelompok masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar 1 kelompok atau 33% menurun. Tren capaian kinerja IKU ini pada Triwulan III mengalami fluktuasi jika dibandingkan dari tahun 2020. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp365.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp252.545.000 pada tahun 2024.



Gambar 3.1.7-1. Grafik Capaian Bantuan KOMPAK Triwulan III tiap Tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL Tahun 2020 – 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena tidak terdapat target IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 yaitu sebanyak 3 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian kumulatif Triwulan III tahun 2024 sebanyak 2 kelompok masyarakat telah berkontribusi sebesar 66,67% dari target Rencana Strategis BPSPL Pontianak. Hal itu dikarenakan terdapat penurunan target kinerja dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok yang disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp365.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp252.545.000 pada tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terdapat penurunan capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2023. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp365.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp252.545.000 pada tahun 2024. Keberhasilan pencapaian IKU ini bergantung kepada keaktifan kelompok masyarakat dalam memenuhi berkas kelengkapan administrasi persyaratan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024. Untuk itu, perlu dilakukan pendampingan yang intensif kepada kelompok masyarakat untuk memastikan kelengkapan administrasi persyaratan telah sesuai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Penyampaian Hasil Identifikasi

Penyampaian Hasil Identifikasi dan Verifikasi Pokmaswas Padaidi dilakukan melalui melalui Surat Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Nomor B.1654/DJPKRL.5/PRL.440/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.

b. Pelaksanaan Pengadaan Barang Bantuan

Pelaksanaan pengadaan barang Bantuan KOMPAK melalui:

- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHP) nomor B.3338/PP.2.10/PL.450/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 55/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 uraian Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Cempedak Lestari di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket.
- Berita Acara Pembayaran No. 51-1/BPSPL.2/PPK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.
- Berita Acara Pembayaran No. 51-2/BPSPL.2/PPK/IX/2024 tanggal 2 September 2024.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor BAPB.58/BPSPL.2/PPK/IX/2024 tanggal 2 September 2024
- Berita Acara Serah Terima Pekerja (BAST) No.58/BPSPL.2/PPK/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

c. Serah Terima Bantuan

Serah terima bantuan KOMPAK pada Kelompok Masyarakat Cempedak Lestari dari Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23 September 2024. Bantuan konservasi yang diberikan berupa satu unit kapal speedboat berbahan fiber beserta kelengkapannya dengan nilai sebesar Rp. 99.900.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Konservasi B.3260/BPSPL.2/PRL.440/IX/2024 tanggal 23 September 2024.



Gambar 3.1.7-2. Serah Terima Bantuan KOMPAK

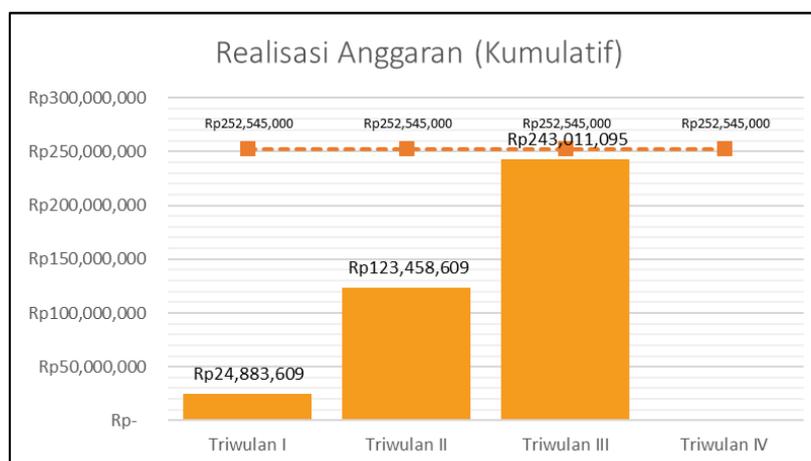
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Realisasi kegiatan berdasarkan rincian output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.7-2. Realisasi IKU 8 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.QEH.001.051] Pemberian bantuan KOMPAK	Rp 252.545.000	Rp243.011.095 (96,22%)	-
TOTAL		Rp 252.545.000	Rp243.011.095 (96,22%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp243.011.095 atau 96,22% dari pagu anggaran sebesar Rp 252.545.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.



Gambar 3.1.7-3. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melakukan monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang telah mendapatkan bantuan di tahun berjalan. Menyusun laporan pengadaan dan serah terima bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

IKU 9. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Bantuan masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan. Teknik menghitung dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di Kawasan Konservasi pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Capaian IKU 9 BPSPL Pontianak Sebagai berikut

SK-7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak									
IKU-9	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	2	-	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III yaitu koordinasi awal dan identifikasi peningkatan mata pencaharian alternatif di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Pada tahun 2023 belum terdapat IKU "Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru". Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 sebanyak 3 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum terdapat progres kegiatan yang dilakukan karena blokir anggaran baru dibuka pada bulan Juni. Terdapat perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [2362.SCC.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya. Target Rincian Output juga mengalami perubahan dari 1 Kelompok menjadi 60 Orang, sehingga terdapat perbedaan antara target Rincian Output dengan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Untuk itu, perlu berkoordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL untuk melakukan revisi Perjanjian Kinerja dan menyesuaikan target PK dengan target RO.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis

efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

a. Identifikasi Kelompok Untuk Mata Pencaharian Alternatif di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan identifikasi kelompok dilakukan pada tanggal 30-31 Juli 2024 berlokasi di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk mata pencaharian yang dapat dijadikan alternatif selain sebagai nelayan bagi masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu wawancara menggunakan alat peraga berupa kuisioner pada enam desa: Desa Sangkuliman, Desa Pela, Desa Liang Ulu, Desa Liang Ilir, Desa Sebelimbingan, Desa Kota Bangun Sebrang. Hasil dari wawancara secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar responden berprofesi sebagai nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan.



Gambar 3.1.7-4. Identifikasi Kelompok Mata Pencaharian Alternatif di KK Mahakam Hulu

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REA.003] Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan. Belum terdapat realisasi anggaran karena blokir anggaran baru dibuka pada Bulan Juni. Terdapat perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [2362.SCC.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya.

Tabel 3.1.7-3. Realisasi IKU 9 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.SCC.002.051] Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi	Rp 350.000.000	Rp65.594.281 (18,74%)	-
TOTAL		Rp 350.000.000	Rp65.594.281 (18,74%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melakukan pelatihan dalam rangka fasilitasi mata pencaharian alternatif kepada nelayan yang berlokasi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Selain itu, penyusunan laporan kegiatan juga ditargetkan selesai pada Triwulan IV.

3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 10. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja kerja BPSPL Pontianak adalah Jenis ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah 7 (tujuh) yaitu Penyu, Kima, Lola, Terubuk, Pari Air Tawar, Karang, dan Mamalia Laut. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

- Pendataan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis Penyu, Kima, Lola, Terubuk, dan Pari Air Tawar.
- Perbaikan habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Karang.
- Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi seperti mamalia laut.

Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak

SK-8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak									
IKU-10	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
13	Periode Capaian Tahunan			7	-	9	-	20	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I 2024 yaitu untuk 3 jenis berikut: Kima (penyediaan data populasi), Karang (pembuatan *Coral* dan Mamalia Laut (respon cepat penanganan mamalia laut terdampar). Sementara progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2024 yaitu untuk 3 jenis berikut: Lola (penyediaan data populasi), Enumerasi Hiu dan Pari Apendiks (penyediaan data populasi) dan Mamalia Laut (respon cepat penanganan mamalia laut terdampar). Total progress kegiatan kumulatif yang sudah dilakukan hingga Triwulan III yaitu 6 jenis ikan terancam punah telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak memiliki target triwulanan. Namun, pada Triwulan III tahun 2023 terdapat progres capaian kumulatif sebesar 8 jenis. Jika dibandingkan dengan progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2024 (kumulatif 6 jenis), maka progres kegiatan mengalami penurunan sebesar 25% dari progres kegiatan pada Triwulan III tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 yaitu 20 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan kumulatif Triwulan III sebanyak 6 jenis memiliki peran sebesar 30% dari capaian target jangka menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 9 jenis di tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra Ditjen PKRL karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan kumulatif Triwulan III sebanyak 5 jenis memiliki peran sebesar 66,67% dari capaian target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan penyediaan data populasi penyusutan respon cepat mamalia laut terdampar dan sosialisasi biota laut dilindungi/terancam punah. Respon cepat mamalia laut terdampar memerlukan informasi yang akurat dari masyarakat yang melapor, sehingga perlu koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan pelapor. Selain itu, akses lokasi kejadian biota terdampar yang sulit dijangkau serta keterbatasan akses telekomunikasi menjadi kendala dalam pelaksanaan respon cepat. Oleh karena, dibentuk jejaring penanganan di wilayah kerja sebagai solusi untuk respon cepat biota terdampar. Pada Triwulan sebelumnya, belum terdapat mata anggaran untuk Pendataan Populasi Terubuk dan Pari Air Tawar sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada Sekretaris Ditjen PKRL terkait dengan mata anggaran kedua kegiatan tersebut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

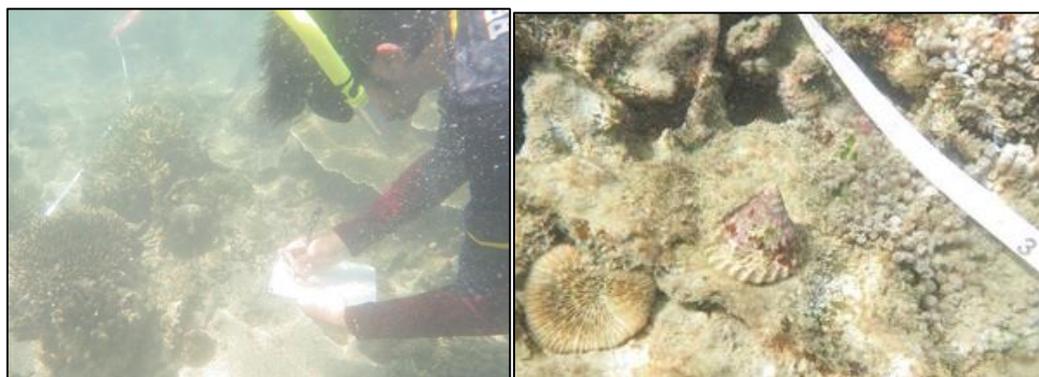
Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Pembentukan jejaring penanganan biota terdampar menjadi upaya untuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam menjangkau lokasi kejadian yang sulit diakses.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Survei Penyediaan Data Populasi Lola di Kalimantan Selatan

Kegiatan penyediaan data populasi lola (*Trochus nilotus*) di Kalimantan Selatan dilaksanakan di Pulau Kerayaan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 5 – 14 September 2024. Sebelum survei, dilakukan koordinasi dengan BKIPM dan PSDKP Kalimantan Selatan untuk mencari informasi mengenai lalu lintas dan penangkapan lola di Kalimantan Selatan. Selain itu, dilakukan koordinasi juga dengan Kelompok Masyarakat Padaidi yang berlokasi di Kabupaten Kotabaru untuk mendapatkan informasi mengenai informan yang mengetahui lokasi kerrang lola. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan FGD untuk melakukan pemetaan partisipatif oleh masyarakat dan nelayan sekitar terkait lokasi potensial Lola di Pulau Kerayaan.



Gambar 3.1.8-1. Survei Populasi Lola di Kalimantan Barat

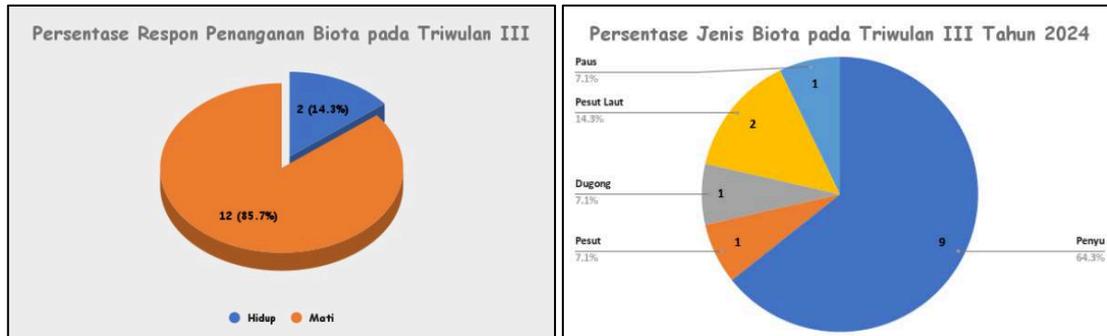
Survei lapangan dilakukan di 3 lokasi/stasiun pengamatan yang merupakan lokasi potensial berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan Pemetaan Partisipatif terhadap masyarakat pada kegiatan FGD. Metode pengamatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan menggunakan transek garis pada titik sampel. Stasiun pertama berlokasi di bagian barat Pulau Kerayaan. Ditemukan sebanyak 4 individu lola di sekitar transek pengamatan. Stasiun kedua berlokasi di bagian barat daya Pulau Kerayaan. Ditemukan sebanyak 11 individu lola di sekitar transek pengamatan. Stasiun ketiga berlokasi di bagian timur Pulau Kerayaan. Ditemukan sebanyak 9 individu lola di sekitar transek pengamatan. Total sebanyak 24 individu lola yang ditemukan selama pelaksanaan survei penyediaan data populasi Lola di 3 lokasi/stasiun pengamatan di sekitar Pulau Kerayaan

b. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah

Selama periode Triwulan III (Juli hingga September 2024) tercatat 14 (empat belas) informasi kejadian terkait biota dilindungi dan/atau terancam punah yang meliputi kejadian terdampar, terjatir jaring, dan biota yang hanyut. Terdapat 4 (empat) jenis biota dilindungi dan/atau terancam punah yang dilakukan penanganan yaitu pesut, penyu, dugong dan paus. Sebanyak 2 (dua) kejadian ditemukan dalam kondisi hidup (kode 1), 12 (dua belas) kejadian merupakan biota dengan kondisi mati (kode 2, 3 dan 4). Penanganan biota dalam kondisi hidup dilakukan pelepasliaran sedangkan penanganan biota mati dengan cara dikuburkan pada sekitar lokasi penemuan.



Gambar 3.1.8-2. Dokumentasi Penanganan Biota Terdampar



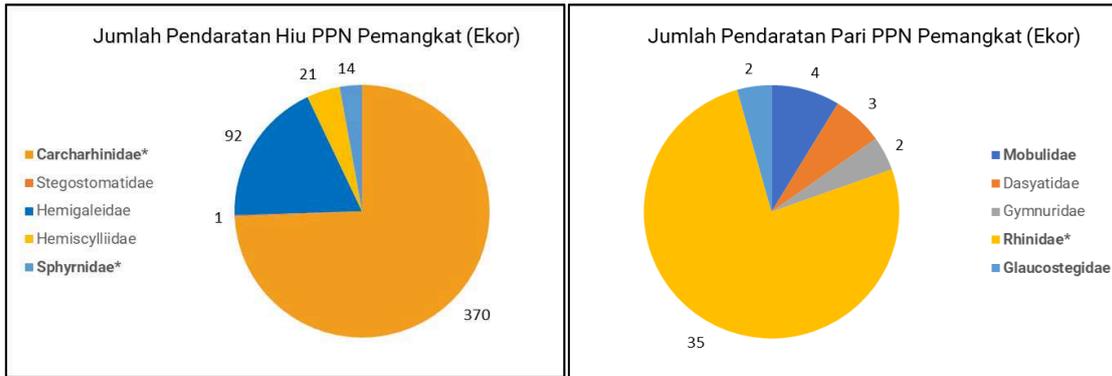
Gambar 3.1.8-3. Grafik Penanganan Biota Terdampar

c. Enumerasi/Pendataan Hiu Pari Apendiks

Kegiatan penyediaan data hiu dan pari apendiks di Wilayah Kalimantan dilaksanakan oleh tenaga Enumerator dari bulan Juli – September 2024. Kegiatan pendataan ini dilakukan di tiga lokasi yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Kalimantan Barat, Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Sungai Kakap Kalimantan Barat, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Manggar Kalimantan Timur. Hasil dari pendataan Hiu dan Pari Apendiks dari tiap-tiap lokasi:

➤ Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di PPN Pemangkat pada periode Juli – September, didapatkan total 498 ekor hiu dengan hiu yang termasuk apendiks sebanyak 384 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili *Carcharhinidae* sebanyak 370 ekor. Sementara itu, sebanyak total 46 ekor pari didaratkan sepanjang Triwulan III dengan pari apendiks yang didaratkan sebanyak 41 ekor. Jenis pari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili *Rhinidae* sebanyak 35 Ekor. Jenis hiu yang paling sedikit didaratkan yaitu dari family *Hemiscylliidae* sebanyak 1 ekor dan jenis pari paling sedikit yang ditemukan yaitu dari famili *Gymnuridae* dan *Glaucostegidae* sebanyak masing-masing 2 ekor.



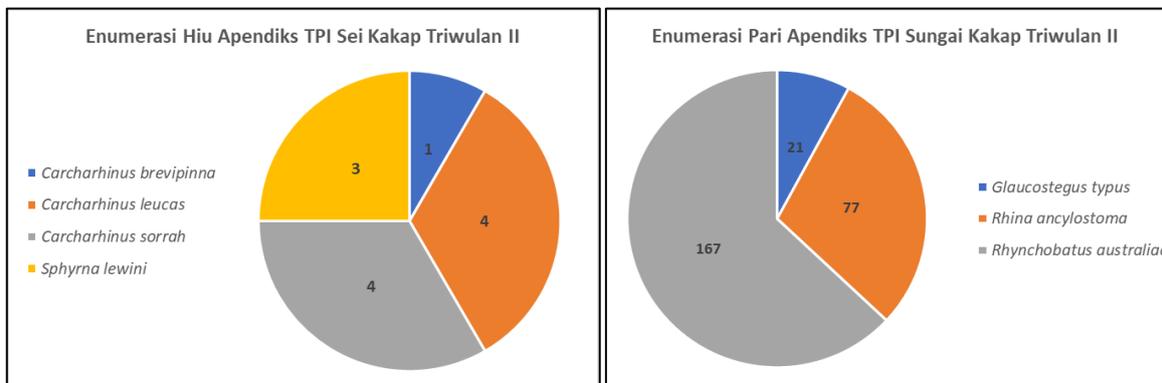
Gambar 3.1.8-4. Grafik Hasil Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat



Gambar 3.1.8-5. Dokumentasi pengukuran

➤ *Pendataan Hiu Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap*

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap pada periode Juli – September, didapatkan 4 jenis hiu apendiks sebanyak 12 ekor dan 3 jenis pari apendiks sebanyak 265 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu *Carcharhinus sorrah* sebanyak 4 ekor dan jenis pari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu *Rhynchobatus australiae* sebanyak 167 Ekor. Jenis hiu apendiks paling sedikit yang ditemukan yaitu *Carcharhinus brevipinna* sebanyak 1 ekor dan jenis pari apendiks paling sedikit yang ditemukan yaitu *Glaucostegus typus* sebanyak 21 ekor.

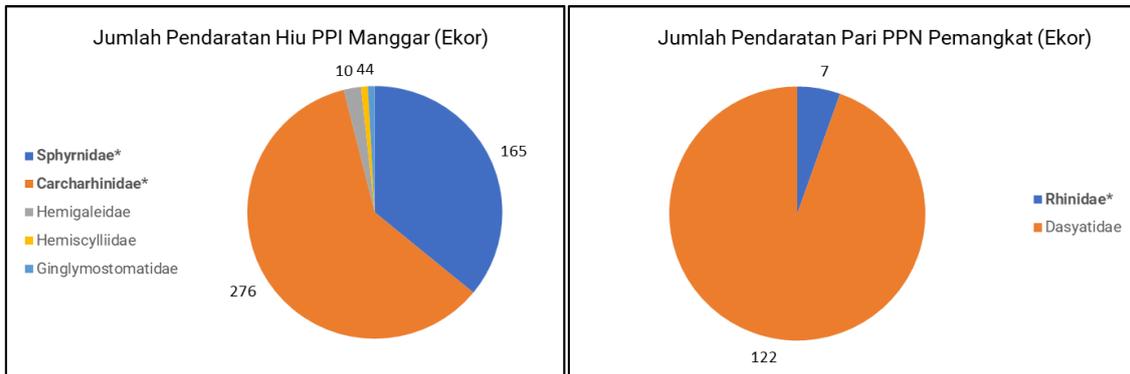


Gambar 3.1.8-6. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap

➤ *Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPI Manggar*

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di PPI Manggar pada periode Juli – September, didapatkan total 459 ekor hiu dengan hiu yang termasuk apendiks sebanyak 441 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili *Carcharhinidae* sebanyak 276 ekor. Sementara itu, sebanyak total 129 ekor pari

didaratkan sepanjang Triwulan III dengan pari apendiks yang didaratkan sebanyak 7 ekor. Jenis pari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili *Rhinidae* sebanyak 7 Ekor. Jenis hiu yang paling sedikit didaratkan yaitu dari family *Hemigaleidae* dan *Hemiscylliidae* sebanyak masing-masing 4 ekor dan jenis pari paling sedikit yang ditemukan yaitu dari famili *Rhinidae* sebanyak 7 ekor.



Gambar 3.1.8-7. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks PPI Manggar



Gambar 3.1.8-8. Dokumentasi Pengukuran

d. Workshop Penilaian E-PANJI Tahun 2024

Kegiatan Workshop Penilaian E-PANJI dilaksanakan pada tanggal 15-17 September 2024 di Hotel Ibis Style Bogor Raya, Kab. Bogor. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Apendiks CITES (EPANJI) tahun 2024 serta yang menjadi 20 jenis ikan prioritas pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerangka penilaian E-PANJI memiliki kriteria dan indikator penilaian memiliki bobot berdasarkan jumlah pertanyaan yang terbagi menjadi: input, proses, output, outcome. Hasil penilaian didapatkan nilai sebesar 82,55 dengan kategori berkelanjutan.



Gambar 3.1.8-9. Workshop Penilaian E-PANJI

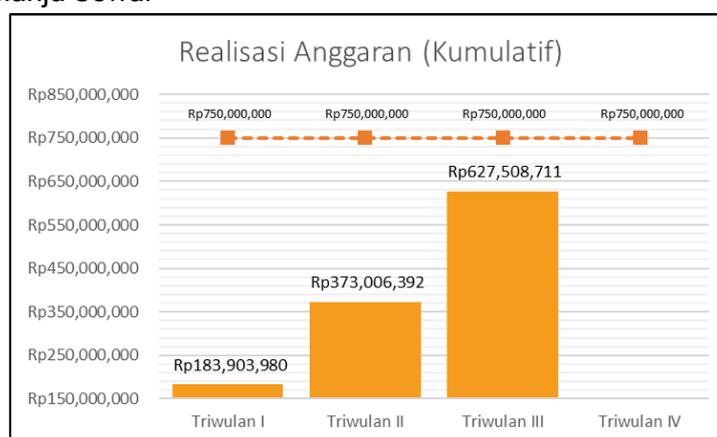
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB.001] Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan. Rincian realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi rincian output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.8-2. Realisasi IKU 10 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	Rp195.261000	Rp116.876.980 (59,86%)	-
2.	[2362.REB.001.052] Rehabilitasi Populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah	Rp129.115.000	Rp122.286.488 (94,71%)	-
3.	[2362.REB.001.053] Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah	Rp45.612.000	Rp32.971.012 (72,29%)	-
4.	[2362.REB.001.054] Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah	Rp380.012.000	Rp 355.374.231 (93,52%)	-
TOTAL		Rp 750.000.000	Rp627.508.711 (83,67%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp627.508.711 atau 83,67% dari pagu anggaran sebesar Rp 750.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Sewa.



Gambar 3.1.8-10. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melaksanakan kegiatan sosialisasi biota dilindungi/terancam punah, survei pendataan populasi terubuk di Kalimantan Barat, survei pendataan populasi Pari Air Tawar di Kalimantan Tengah dan respon cepat penanganan mamalia laut terdampar. Selain itu, penyusunan laporan juga ditargetkan selesai pada Triwulan IV.

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana).
- Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Apendiks, Teripang, dan Arwana).
- Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang dan Arwana di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species; penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; dan verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak

SK-9	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU-11	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
5	Periode Capaian Tahunan			4	-	5	-	20	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan. Namun, progress capaian Triwulan III Tahun 2024 yaitu pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan untuk 5 jenis ikan (Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Arwana Super Red, Arwana Silver dan Teripang) serta verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan untuk 4 jenis ikan (Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Arwana Super Red dan Arwana Silver). Selain itu, dilakukan Survei Pemanfaatan Arwana di Kalimantan Barat dan Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Namun, pada Triwulan III tahun 2023 terdapat progres capaian kumulatif sebesar 5 jenis. Jika dibandingkan dengan progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2024 (kumulatif 5 jenis), maka progres kegiatan sama dengan Triwulan III tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 sebanyak 20 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 5 jenis telah berperan sebesar 25% dari Target Jangka Menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebanyak 5 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra BPSPL Pontianak karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 5 jenis telah berperan sebesar 100% dari Target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan rutin setiap bulan (Januari – Desember). Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBPN. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PNBPN. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBPN melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual. Selain itu, banyaknya permohonan perizinan pemanfaatan jenis ikan memerlukan jumlah petugas pelayanan yang banyak. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan Pengadaan Pegawai Kontrak berupa Petugas Pelayanan untuk membantu pelayanan operasional perizinan jenis ikan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan melakukan verifikasi secara daring (*online*) dalam rangka penerbitan dokumen angkut jenis ikan.

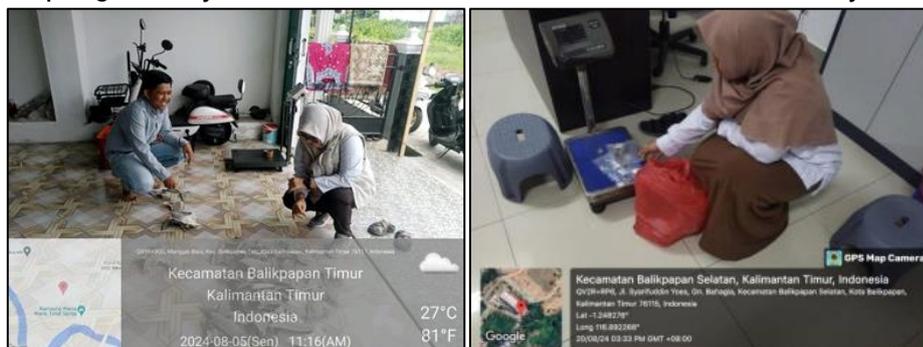
7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi)

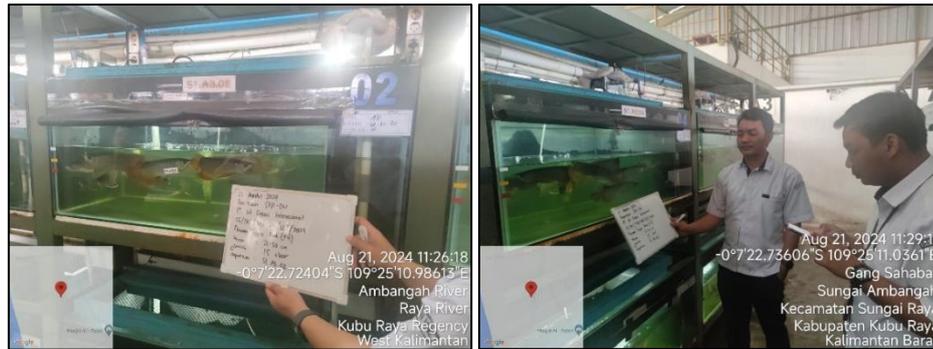
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setiap bulan pada Triwulan III (Juli – September). Kegiatan ini terdiri dari:

- **Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)**
Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilakukan untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil verifikasi permohonan SIPJI pada Triwulan III terdapat 5 pelaku usaha yang melakukan permohonan verifikasi SIPJI di Provinsi Kalimantan Barat.
- **Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi**
Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk jenis ikan yang memiliki kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama Triwulan III terdapat total 57 Surat Rekomendasi dengan 55 surat diterbitkan ke dalam negeri (DN) dan 2 surat ke luar negeri (LN). Tujuan pengiriman Surat Rekomendasi DN paling banyak ditujukan ke Kota Administrasi Jakarta Utara. Sementara itu, untuk tujuan pengiriman Surat Rekomendasi Luar Negeri paling banyak ditujukan ke Negara Malaysia. Untuk jenis hiu dan pari *look alike species*, sebanyak 42 surat telah diterbitkan. Sementara itu, sebanyak 15 Surat Rekomendasi untuk jenis teripang telah diterbitkan. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk hiu pari *look alike* terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 13 surat. Sementara penerbitan Surat Rekomendasi untuk teripang terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 6 surat.



Gambar 3.1.9-1. Pemeriksaan Surat Rekomendasi

- **Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)**
Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman di dalam negeri. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama Triwulan III terdapat 51 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. Sementara itu, sebanyak 602 SAJI DN untuk jenis Arwana *Scleropages formosus* telah diterbitkan, 44 SAJI DN diantaranya juga mengangkut Arwana *Osteoglossum bicirrhosum* (Arwana Silver). Penerbitan SAJI DN untuk hiu dan pari Appendiks CITES terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 24 surat. Sementara penerbitan SAJI DN untuk arwana terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 631 surat.



Gambar 3.1.9-2. Pemeriksaan SAJI

➤ **Verifikasi Lapangan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)**

Verifikasi Lapangan SAJI LN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari Verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KEBP. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama Triwulan III terdapat 253 Verifikasi SAJI LN untuk untuk jenis Arwana telah dilakukan. Verifikasi Lapangan untuk SAJI LN terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 250 surat. Negara dengan tujuan ekspor terbanyak yaitu China dengan 149 surat, kemudian Vietnam dengan 38 surat dan Taiwan dengan 21 surat.

➤ **Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana**

Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana dilakukan untuk pengiriman Ikan Arwana yang telah memiliki SAJI-LN terbit. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan Arwana yang disuntik telah sesuai dengan SAJI-LN yang sudah terbit. Pemeriksaan dilakukan dengan observasi pemasangan chip ikan dan penandaan (*scan*) pada ikan Arwana. Sepanjang Triwulan III (Juli – September) telah dilakukan 117 pemeriksaan penandaan.



Gambar 3.1.9-3. Penandaan Arwana

➤ **Pemeriksaan Keberangkatan**

Pemeriksaan Keberangkatan dilakukan untuk pengiriman ikan Arwana yang akan diberangkatkan dan telah memiliki SAJI baik LN maupun DN. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan yang diberangkatkan telah sesuai dengan dokumen SAJI yang sudah terbit. Sepanjang Triwulan III (Juli – September) telah dilakukan 788 pemeriksaan keberangkatan.



Gambar 3.1.9-4. Pemeriksaan keberangkatan

➤ **Verifikasi Stok Ikan**

Verifikasi Stok Ikan dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Stok Ikan berupa Berita Acara Pemeriksaan.

➤ **Verifikasi Hasil Panen**

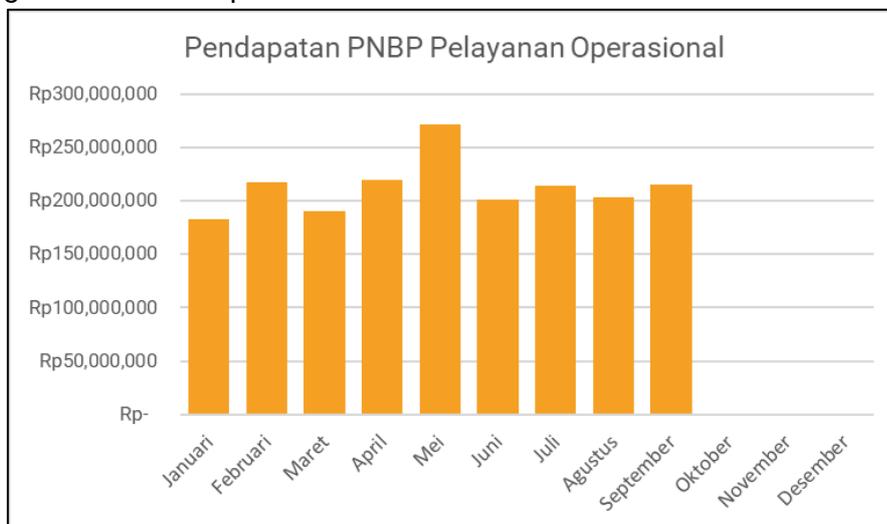
Verifikasi Hasil Panen dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan.

➤ **Pengesahan Sertifikat Hasil Pemanenan**

Pengesahan Sertifikat dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Pengesahan Sertifikat berupa Sertifikat yang telah ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak. Total sertifikat Arwana Hasil Pemanenan yang telah disahkan pada Triwulan III 17.773 sertifikat.

➤ **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

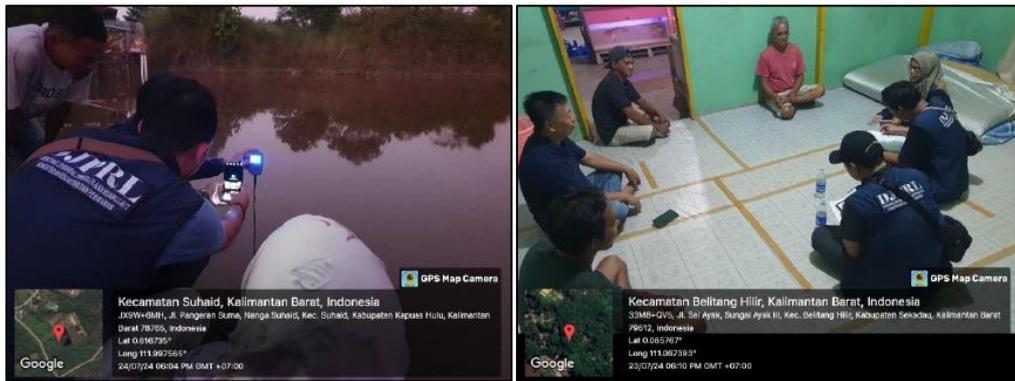
Pendapatan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sampai dengan Triwulan III (Kumulatif) sebesar Rp1.914.904.381. Total PNBP yang diterima pada Juli – September sebesar Rp632.211.040. Nilai PNBP tertinggi pada Triwulan III didapatkan pada bulan September sebesar Rp214.796.300, sementara terendah didapatkan pada bulan Agustus sebesar Rp203.702.925.



Gambar 3.1.9-5. Grafik Pendapatan PNBP

b. Survey Pemanfaatan Arwana di Kalimantan Barat

Kegiatan Survey Pemanfaatan Arwana dilakukan pada tanggal 23 – 27 Juli 2024 di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dari survey tersebut yaitu untuk mengumpulkan data pemanfaatan arwana dari pelaku usaha arwana, baik yang sudah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pelaku usaha dan pengambilan foto udara fasilitas pengembangbiakan arwana. Data - data yang diambil pada kegiatan survey meliputi: perizinan yang dimiliki, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki, lokasi area pengembangbiakan, jumlah indukan atau benih, periode produksi, metode dan teknologi yang digunakan, tingkat kelangsungan hidup arwana *ex-situ*, dan alur perdagangan. Sebanyak 24 pelaku usaha rumahan yang terafiliasi dengan 5 perusahaan pemilik SIPJI telah dilakukan wawancara dan pengambilan data.



Gambar 3.1.9-6. Survei Pemanfaatan Arwana

c. Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Teripang

Kegiatan Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Teripang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2024 bertempat di Kantor BPSPL Pontianak secara daring dan luring. Tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai peningkatan kapasitas pegawai BPSPL Pontianak yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan verifikasi SAJI maupun Rekomendasi. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi mengenai etika pelayanan publik dengan narasumber dari Balai Diklat Aparatur (BDA) KKP Sukamandi. Disampaikan bahwa etika publik merupakan refleksi tentang standar norma yang menentukan tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik sehingga menghasilkan fokus pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.



Gambar 3.1.9-7. Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai biologi, identifikasi pemanfaatan dan status perlindungan teripang dengan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Disampaikan bahwa teripang merupakan salah satu famili dari timun laut, yaitu famili *Holothuriidae*. Dalam penentuan jenis teripang, salah satu bagian tubuh yang dapat dijadikan acuan yaitu spikula (kerangka dalam yang terletak di dalam teripang). Teripang umumnya dimanfaatkan sebagai obat-obatan untuk memperbaiki stamina tubuh manusia serta untuk kosmetik. Terdapat beberapa jenis teripang yang masuk ke dalam Appendiks CITES, yaitu *Holothuria fuscogilva*, *Holothuria nobilis*, *Holothuria Whitmaei*, *Thelenota ananas*, *Thelenota anax*, dan *Thelenota rubralienata*. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan praktek identifikasi teripang dan post-test sebagai evaluasi kegiatan.

d. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan pendukung lain yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan *look alike species* diantaranya:

➤ *Rapat tata niaga pelayanan jenis ikan*

Rapat tata niaga pelayanan jenis ikan dilakukan secara rutin setiap bulan dalam rangka membahas perkembangan peraturan dan tata niaga perdagangan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan *look alike species*.

➤ *Diskusi morfometrik arwana*

Diskusi morfometrik arwana dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan mengundang Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP) dan peneliti BRIN. Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari pola pertumbuhan Ikan Arwana berdasarkan riset yang sudah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya diskusi morfometrik, petugas pelayanan dapat melakukan simulasi pertumbuhan arwana melalui cara pengolahan data yang memenuhi kaidah ilmiah sebagai dasar validasi stok arwana.



Gambar 3.1.9-8. Diskusi Morfometrik Arwana

➤ *Pemantauan dan Peninjauan Bisnis Proses Ekspor Jenis Ikan Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan*

Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 26 September dengan melibatkan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan dan Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk Kalimantan Barat. kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memastikan perpindahan tusi dari KLHK ke KKP untuk beberapa jenis dapat berjalan secara lancar pasca perpindahan. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mencari informasi kendala yang dihadapi untuk selanjutnya

dapat dilakukan perbaikan tata kelola, menjaring informasi dari pelaku usaha dan tinjauan ke lapangan.



Gambar 3.1.9-9. Pemantauan dan Peninjauan Bisnis Proses Ekspor Jenis Ikan Appendiks CITES Hasil Pengembangan

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB.002] Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.9-2. Realisasi IKU 11 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.REB.002.051] Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES	Rp200.000.000	Rp48.323.042 (24,16%)	-
2.	[2362.REB.002.052] Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	Rp1.100.000.000	Rp635.651.592 (57,79%)	-
TOTAL		Rp1.300.000.000	Rp683.974.634 (52,61%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 683.974.634 atau 52,61% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.300.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Bahan dan Belanja Barang Operasional Lainnya.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu Pelayanan operasional perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan Oktober – Desember 2024, survey pemanfaatan teripang di Kalimantan Timur, survei pemanfaatan arwana di Kalimantan Barat. Selain itu, penyusunan laporan kegiatan juga ditargetkan selesai pada Triwulan IV.

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 12. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/ekstraksi termasuk yang berasal dari laut dalam dengan skala lebih besar dari 50 liter/detik dan/atau berada pada kawasan konservasi serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari. Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah tindakan inventarisasi/pengumpulan data dan informasi yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang akan didorong proses perizinannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengurusan perizinan air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan apabila terdapat permohonan di OSS. Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

Tabel 3.1.10-1. Capaian IKU 12 PNBP BPSPL Pontianak

SK-10	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-12	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	-	-	5	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan pada Triwulan III yaitu identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) di Kalimantan Barat.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 pada tahun 2024 yaitu sebanyak 5 lokasi kawasan yang terfasilitasi perizinan pengelolaan perairan. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka Menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan dan tidak terdapat dalam Renstra.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu Sosialisasi perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan, telah dilaksanakan. Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh keaktifan pemohon dalam mengajukan pemanfaatan perizinan air laut selain energi. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Kelautan dan melakukan sosialisasi perizinan berusaha bidang jasa kelautan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu identifikasi pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) di Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 21 September 2024 pada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT PLN Indonesia Power UBP Singkawang, PT GCL Indo Tenaga yang berlokasi di Kab. Mempawah dan PT Energi Unggul Persada yang berlokasi di Kabupaten Mempawah. Sebelum kegiatan identifikasi, dilakukan sosialisasi dengan menyampaikan jenis-jenis pemanfaatan ALSE, KBLI yang digunakan, dasar hukum, gambaran umum pemanfaatan ALSE, pembagian kewenangan dan tarif PNBPN.



Gambar 3.1.10-1. Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kalimantan Barat

Metode yang digunakan dalam kegiatan identifikasi yaitu wawancara dengan alat peraga berupa kuisisioner. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam wawancara diantaranya: tujuan pemanfaatan ALSE, kapasistas pemanfaatan ALSE, metode dan teknologi yang digunakan, sarana yang digunakan, waktu operasi dan intensitas dan tenaga kerja yang digunakan. Dari

hasil wawancara pada ketiga perusahaan tersebut, didapatkan informasi bahwa tujuan dari pemanfaatan ALSE yaitu untuk bahan baku pembuatan uap, metode demineralisasi, air pendingin kompresor dan bahan baku untuk kebutuhan domestik. Rerata debit volume pemanfaatan ALSE pada ketiga perusahaan tersebut yaitu 0,0064 – 8,89 m³/detik (debit intake) dan 0,006 – 8,88 m³/detik (debit outfall). Metode yang digunakan oleh ketiga perusahaan tersebut yaitu Metode Air Baku dan Metode Air Pendingin. Selanjutnya, hasil identifikasi pemanfaatan ALSE ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan profil pemanfaatan ALSE di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

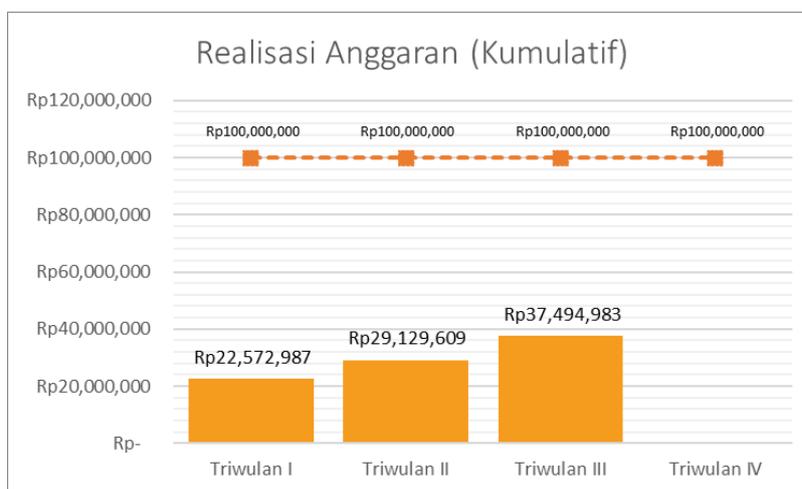
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2363.PBW.002] Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut.

Tabel 3.1.10-2. Capaian IKU 12 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2363.PBW.002.052] Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Pemanfaatan Air Laut	Rp100.000.000	Rp37.494.983 (37,49%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp37.494.983 (37,49%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp37.494.983 atau 37,49% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan.



Gambar 3.1.10-2. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu verifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) apabila ada pengajuan permohonan perizinan Pemanfaatan ALSE. Selain itu, penyusunan laporan kegiatan juga ditargetkan selesai pada Triwulan IV.

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 13. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL). Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merujuk pada satuan wilayah Kabupaten/Kota. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sampah plastik di Laut. Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah plastik yang masuk laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah plastik untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau Kecil berupa kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.11-1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak

SK-11	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU-13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			4	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 diantaranya: identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gernas BCL, identifikasi dan verifikasi nelayan dan mitra serta koordinasi terkait dengan pengangkutan sampah ke pihak terkait.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak” merupakan IKU baru di tahun 2024 ini. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020-2024 yaitu sebanyak 5 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan III belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan *stakeholder* terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan III yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dilakukan pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 8 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 60 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya selama delapan minggu telah mengumpulkan sebanyak 23,7 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 7,18 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomis sejumlah Rp4.863.000.



Gambar 3.1.11-1. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

b. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapak Besar sebanyak 28 orang, Kel. Naram sebanyak 22 orang dan Kel Kuala sebanyak 20 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang telah mengumpulkan 11,9 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 6,87 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp 10.525.800.



Gambar 3.1.11-2. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

c. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 76 orang dan Desa Bawah Layung sebanyak 6 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Baiman Banjarmasin. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Tanah Laut telah mengumpulkan sebanyak 4,8 ton sampah dengan sampah yang bernilai ekonomis sebesar Rp4.196.950.



Gambar 3.1.11-3. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

d. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

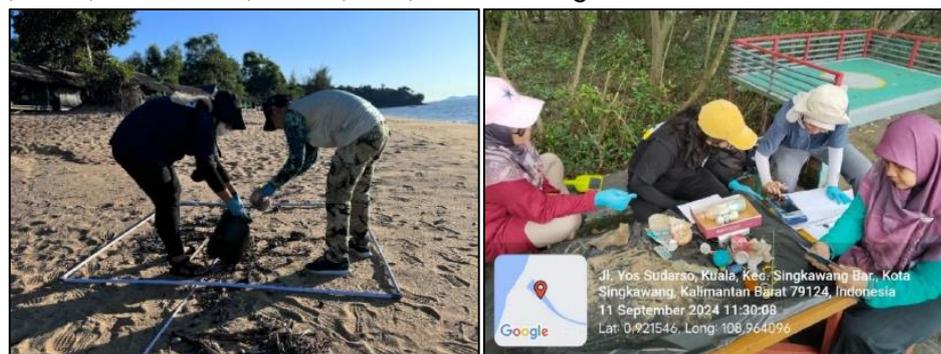
Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggang sebanyak 80 orang).



Gambar 3.1.11-4. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

e. Monitoring Sampah Pesisir dan Laut di Kota Singkawang

Monitoring sampah pesisir dan laut dilakukan pada tanggal 9 – 12 September 2024 di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk memantau kondisi sampah yang ada di pesisir dan laut sekitarnya pasca pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut. Metode survei yang digunakan yaitu dengan menarik garis transek dan memantau jumlah sampah pada tiga lokasi sampling: Pantai Singka Island Park, Pantai Kuala Singkawang dan Pantai Viral. Pada masing – masing lokasi terkumpul sampah sebanyak 1,348 kg di Pantai Singka; 7,887 kg di Pantai Kuala Singkawang; dan 0,619 kg sampah di Pantai Viral. Jenis sampah yang ditemukan di ketiga lokasi tersebut yaitu plastic, karet, foam/bus, kertas, kain, kaca dan logam.



Gambar 3.1.11-5. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang

f. Bersih Pantai dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kab. Sambas

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2024 dalam rangka menghadiri Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dari Stasiun PSDKP Pontianak melalui kegiatan bersih pantai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi sampah yang ada di pesisir Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Temajuk dan Desa Sebusus. Kegiatan bersih pantai dihadiri oleh PSDKP Pontianak, Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sambas, TNI dan POLRI, POKMASWAS dan pelajar setempat. Sampah yang berhasil dikumpulkan oleh peserta didapatkan sebanyak 1,4 ton yang terdiri dari sampah plastik sisa kemasan makanan, bungkus rokok, puntung rokok, botol minum plastik, botol minum kaca, kaleng biskuit dan lain sebagainya.



Gambar 3.1.11-6. Gerakan Bersih sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah

Identifikasi lokasi monitoring sampah dilakukan di Pantai Camar Bulan, Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan monitoring sampah yaitu di Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut berupa sampah sisa kemasan makanan dan minuman, botol lotion dan puntung rokok. Terdapat sampah kemasan yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

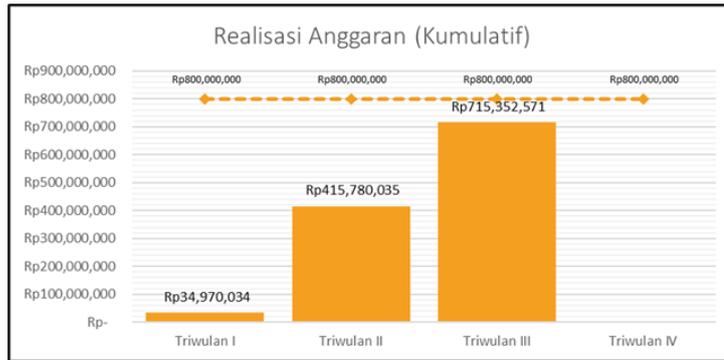
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD.001] Fasilitas Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.11-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[4346.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp800.000.000	Rp715.352.571 (89,42%)	-
TOTAL		Rp800.000.000	Rp715.352.571 (89,42%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp715.352.571 atau 89,42% dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini.



Gambar 3.1.11-7. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember yaitu menyusun laporan kegiatan Bulan Cinta Laut yang telah dilaksanakan.

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM 14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator tersebut diantaranya:

- Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
- Devisiasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%
- Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
- Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
- Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
- Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
- Dispensasi Penyampaian SPM – Bobot Penilaian 5%
- Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA > 95 ;
- Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi daring OM-SPAN Kementerian Keuangan pada laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

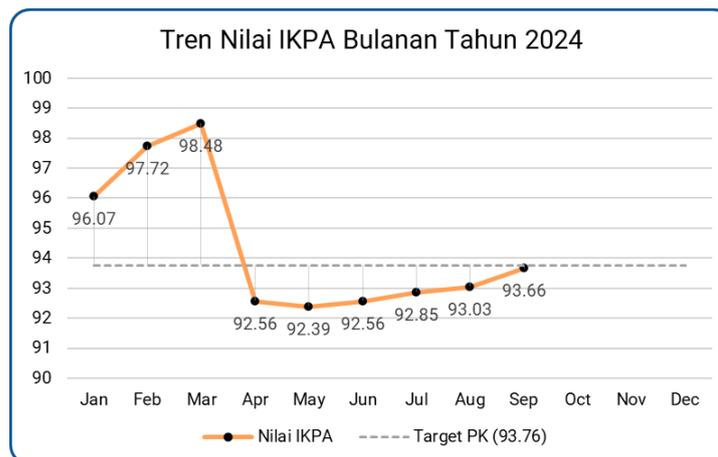
SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak									
IKM-14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
93,03	-	-	-	93,76	99,89	90	104,06	90	104,06	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara semesteran. Namun, berdasarkan hasil pemantauan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bulanan pada situs OMSPAN, progres Nilai IKPA lingkup BPSPL Pontianak sampai dengan 30 September 2024 sebesar 93,66 dengan kategori baik. Secara umum capaian pada Triwulan III tahun 2024

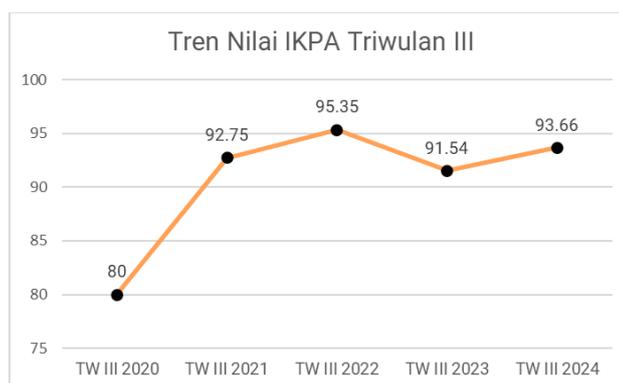
belum mencapai target tahunan sebesar 93,76. Tren bulanan nilai IKPA pada tahun 2024 mengalami penurunan tajam pada bulan Maret ke bulan April. Namun, nilai IKPA mengalami peningkatan secara perlahan dari bulan Mei ke bulan September (Triwulan III).



Gambar 3.1.12-1. Tren Nilai IKPA Tahun 2024 (Sumber: Aplikasi OMSPAN)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian Tahun 2023 dilakukan secara semesteran. Namun progres nilai IKPA Triwulan III tahun 2024 adalah 93,66 (99,89% dari target tahunan sebesar 93,76), sedangkan nilai Triwulan III tahun 2023 adalah 91,54 (97,64% dari target tahunan 93,75). Sehingga progress nilai pada Triwulan III tahun 2024 mengalami peningkatan 2,12% dibandingkan capaian Triwulan III 2023.



Gambar 3.1.12-2. Tren Nilai IKPA Triwulan III (Sumber: Aplikasi OMSPAN)

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian Tahun 2023 dilakukan secara semesteran. Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu nilai IKPA sebesar 90 pada tahun 2024. Progres capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 104,06% (93,66 dari 90). Sehingga progres capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian Tahun 2023 dilakukan secara semesteran. Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 90 untuk tahun 2024. Progres capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 104,06% (93,66 dari 90). Sehingga progres capaian tersebut telah melebihi target Renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh kedisiplinan, konsistensi, ketertiban dan ketepatan waktu dalam unsur pelaksanaan anggaran. Selanjutnya dalam rangka mengupayakan peningkatan nilai IKPA dan mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, Tim Pengelola Anggaran melakukan monitoring secara berkala. Sehingga permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangannya. Selain itu, berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada BPSPL Pontianak

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA secara daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi berupa penggunaan excel dan whatsapp group untuk membantu staf pengelola keuangan dalam memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti permasalahan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Revisi DIPA
 - 1 (satu) kali pada 8 Juli 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
 - 1 (satu) kali pada 12 Juli 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kanwil)
 - 1 (satu) kali pada 5 Agustus 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
 - 1 (satu) kali pada 20 September 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
- b. Penyerapan Anggaran sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp13.183.479.736 atau 70,89% dari pagu anggaran sebesar Rp18.248.113.000 (Sumber Data: OMSPAN per 30 September 2024)
- c. Data Kontrak sebanyak 15 kontrak pada Juli – September 2024
 - Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP Nomor 53/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
 - Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Renovasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket SPK Nomor 54/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.

- Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Cempedak Lestari di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket SPK Nomor 55/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
 - Pengadaan Jasa Lainnya berupa Konsultansi Penyusunan Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu sebanyak 1 Paket SPK Nomor 56/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
 - Pengadaan Sarpras Wilker Mahakam Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 57/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
 - Pengadaan Sarpras Wilker Mahakam Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 57/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
 - Pengadaan Enumerator Kelautan dan Perikanan Selama 6 Bulan sebanyak 1 Tanaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 58-A/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - Pengadaan Enumerator Kelautan dan Perikanan Selama 6 Bulan sebanyak 1 Tanaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 58-B/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Air Conditioner sebanyak 1 Unit SP Nomor 59/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
 - Adendum Kontrak Pengadaan Tenaga Alih Daya (Pramubakti, Pengemudi dan Petugas Keamanan) sebanyak 4 Paket SP Nomor 60/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
 - Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Display KIOSK sebanyak 1 Unit SP Nomor 61/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
 - Pengadaan Rumah Rakit Monitoring Pesut di Kawasan Mahakam Wilayah Hulu TA 2024 sebanyak 1 Paket SP Nomor 62/BPSPL.2/PPK/SPK/IX/2024 tanggal 6 September 2024.
 - Pembayaran honorarium Pegawai Non ASN periode Juli s.d. September 2024.
 - Pembayaran atas Belanja Bahan (Bahan Penunjang WBK).
 - Pembayaran atas Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi.
- d. Penyelesaian Tagihan setiap bulan
- e. Penyelesaian UP sebanyak 2 kali dan TUP 3 kali
- f. Pengisian Capaian Rincian Output (CRO) periode Juli – September 2024
- g. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri undangan eksternal dalam rangka pelaksanaan anggaran
- Menghadiri kegiatan Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkungan Ditjen PKRL dengan UAPPA-E1 Periode Semester 1 TA 2024 pada 10 s.d. 13 Juli 2024 di Yogyakarta.
 - Menghadiri kegiatan Rekonsiliasi dan Evaluasi Realisasi PNBP DJPKRL s.d 31 Agustus 2024 pada 10 September 2024 pada tautan tautan https://bit.ly/Lap_Realisasi_PNBP_Agust2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B. 5348/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
 - Menghadiri kegiatan Penyusunan Proyeksi PNBP DJPKRL s.d 31 Agustus 2024 pada 11 September 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B. 5349/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
 - Menghadiri undangan Penyusunan Dokumen Penganggaran Satker Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2025 di Grand Mercure Kemayoran, Kota Jakarta Pusat pada 14 s.d. 20 Juli 2024 di Jakarta Pusat sesuai Surat Plh. Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.3973/DJPKRL.1/TU.330/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

- Menghadiri kegiatan Pembahasan Usulan Penggunaan PNBPNon SDA Tahun 2025-2027 pada 13 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5413/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 11 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Pembahasan Pagu Penggunaan PNBPNon SDA TA. 2025-2027 pada 30 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5736/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 27 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Finalisasi Dokumen Penganggaran Pagu Alokasi Anggaran TA. 2025 Satker lingkup Ditjen PKRL pada 30 September - 5 Oktober 2024 di Bandung, Jawa Barat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5700/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 26 September 2024.
- Menghadiri Verifikasi Data Pengawasan Internal Kearsipan Internal Lingkup UPT Selaku Unit Pengolah Tahap II tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus sesuai undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B.4185/SJ.6/TU.220/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

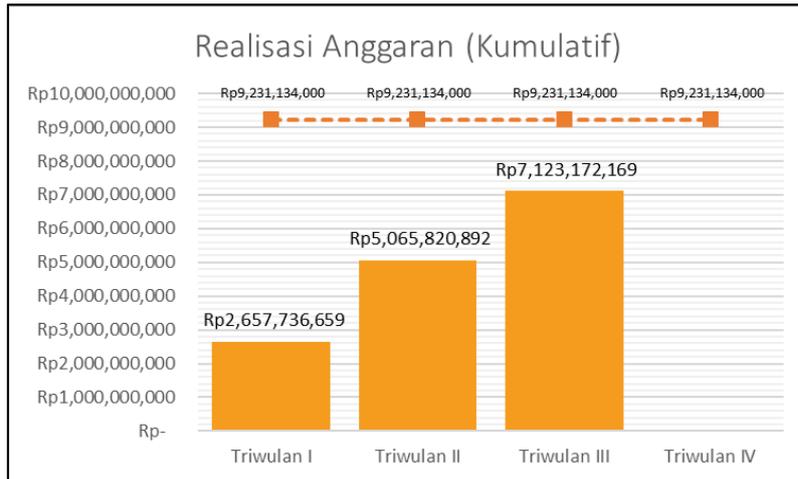
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2367.EBD] Layanan Manajemen Keuangan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output sebagai berikut.

Tabel 3.1.12-2. Realisasi Anggaran IKM 14 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.956.051] Layanan BMN	Rp43.800.000	Rp30.136.095 (68,80%)	-
2.	[2367.EBA.958.051] Layanan Kehumasan	Rp52.000.000	Rp43.996.783 (84,61%)	-
3.	[2367.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	Rp6.297.000.000	Rp4.882.354.292 (77,53%)	-
4.	[2367.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp2.704.534.000	Rp2.066.413.279 (76,41%)	-
5.	[2367.EBD.955.051] Layanan Manajemen Keuangan	Rp133.800.000	Rp100.271.720 (74,94%)	-
TOTAL		Rp9.231.134.000	Rp7.123.172.169 (77,16%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 7.123.172.169 atau 77,16% dari pagu anggaran sebesar Rp 9.231.134.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Gaji dan Tunjangan Lingkup BPSPL Pontianak, Operasional dan Pemeliharaan Kantor BPSPL Pontianak dan Belanja Pengadaan Barang/Jasa.



Gambar 3.1.12-3. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

- Revisi Halaman III DIPA (Kewenangan KPA)
- Pelaksanaan kontrak pengadaan
- Penyelesaian tagihan dan penyerapan anggaran
- Pengisian CRO bulan Oktober – Desember 2024

IKM 15. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pada Level Satuan Kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek Implementasi. Kategori Capaian Indikator Kinerja Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- Baik, apabila NKA >80 – 90;
- Cukup, apabila NKA >60 – 80 ;
- Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak Sebagai berikut

Tabel 3.1.12-3. Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
88	Periode Capain Tahunan			86	-	89	-	89	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024, yaitu nilai NKA sebesar 89 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKM dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020-2024 yaitu 90 di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan III dengan target Renstra BPSPL belum dapat dibandingkan karena IKM ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung/periode pengukuran tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak menerapkan monitoring untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya hal tersebut mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusinya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA dapat secara daring. Selain itu, penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian rincian output. Perhitungan NKA yang

berbasis aplikasi dilakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Juli – Agustus 2024 pada aplikasi SAKTI yang kemudian divalidasi pada aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan III.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melakukan input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Oktober – Desember 2024 pada aplikasi SAKTI. Menyusun Laporan Semester II tahun 2024 pada aplikasi SMART DJA.

IKM 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Adapun standar penilaian antara lain:

- Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40.
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit.
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP. Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal V KKP pada tanggal 14 – 17 Maret 2022 dengan hasil evaluasi senilai 90,81. Selain itu, BPSPL Pontianak juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju WBK pada tanggal 6 Desember 2022.

Tabel 3.1.12-4. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
90,81	Periode Capaian Tahunan			75	-	90	-	90	-

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM ini tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu sebanyak 10 Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRKL Triwulan III Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu nilai WBK BPSPL Pontianak sebesar 80. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRKL Triwulan III Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu rapat kontrol internal dilakukan secara *hybrid* menggunakan aplikasi *zoom meeting*.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

- a. Pengumpulan dokumen komponen pengungkit setiap bulannya untuk periode Juli – September 2024.
- b. Menghadiri Rapat Reviu Akhir Data Dukung PEKPPP Nasional dengan Lokus BPSPL Pontianak Tahun 2024 pada 7 s.d. 9 Juli 2024 di Jakarta Pusat berdasarkan Surat dari Sekretariat Jenderal KKP Nomor B.2787/SJ.7/TU.330/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.
- c. Menghadiri Rekonsiliasi Data Dukung Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PKRL pada 15 s.d. 16 Agustus 2024 di Yogyakarta berdasarkan undangan dari Sekretariat Ditjen PKRL Nomor B.4606/DJPKRL.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

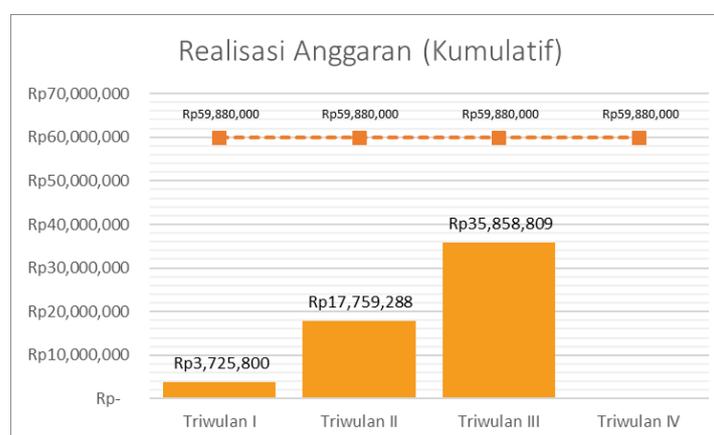
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2367.EBA] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran berdasarkan komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.12-5. Realisasi Anggaran IKM 16 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.960.053] Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	Rp 59.880.000	Rp35.858.809 (59,88%)	-
TOTAL		Rp 59.880.000	Rp35.858.809 (59,88%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp35.858.809 atau 59,88% dari pagu anggaran sebesar Rp 59.880.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan Penunjang WBK dan Konsumsi Rapat.



Gambar 3.1.12-4. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan IV yaitu pengumpulan dokumen komponen pengungkit setiap bulannya untuk bulan Oktober – Desember.

IKM 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- Kualifikasi memiliki bobot 25%
- Kompetensi memiliki bobot 40%
- Kinerja memiliki bobot 30%

d. Disiplin memiliki bobot 5%

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: (a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan (b) Perilaku Kerja. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir. Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/Sangat Tinggi
81 - 90	Cenderung Profesional/Tinggi
71 - 80	Rentan Tidak Profesional/Sedang
61 - 70	Cenderung Tidak Profesional/Rendah
≤ 60	Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah

Hasil pengukuran berdasarkan Indikator tersebut diambil langsung dari *dashboard* IP ASN KKP yang berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di laman <http://ropeg.kkp.go.id>.

Tabel 3.1.12-6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak									
IKM-17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
90,84	-	-	-	88	96,72	76	112	76	112	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara semesteran. Namun, berdasarkan pemantauan Nilai IP ASN melalui situs ropeg.kkp.go.id per tanggal 30 September 2024, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai sebesar 93,48 dengan kategori sangat tinggi. Progres capaian nilai ini telah melebihi target pada perjanjian kinerja dengan persentase 106,22%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara semesteran. Namun, progress Nilai IP ASN pada Triwulan III tahun 2024 adalah 93,48 (106,22% dari target tahunan 88), sedangkan progres capaian Triwulan III tahun 2023 adalah 90,84 (109,44% dari target tahunan 83). Sehingga progres capaian Triwulan III tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,64% dibandingkan progres capaian Triwulan III tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRKL Triwulan III Tahun 2024 karena periode pencapaian dilakukan secara semesteran. Progres capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 123% (93,48 dari 76). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra BPSPL Pontianak Triwulan III Tahun 2024 karena periode pencapaian dilakukan secara semesteran. Namun, progress capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah ropeg.kkp.go.id. Sehingga capaian tersebut telah melebihi target renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang diikuti oleh setiap pegawai. Pengembangan kompetensi diri tersedia secara luring dan daring untuk meningkatkan perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Pelatihan, Diklat, Bimtek, *workshop* dan seminar secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh pihak luar telah diikuti oleh pegawai pada April – Juni 2024, diantaranya adalah:
 - Menghadiri Bimbingan Teknis Implementasi Manajemen Risiko pada 19-20 September 2024 di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat sesuai Surat Undangan nomor B.5474/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024
 - Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP di Yogyakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.4602/DJPKRL.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
 - Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang pada tanggal 22 Agustus 2024.
 - Mengikuti Bimbingan Teknis Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara pada tanggal 12 - 14 Agustus 2024 sesuai undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor 4604/DJPKRL/TU.330/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
 - Menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Lingkup Ditjen PKRL pada 12 s.d. 14 September 2024 di Yogyakarta berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5353/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

- Menyelenggarakan Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi dan Perairan Umum tanggal 22 - 26 Juli 2024.
 - Menghadiri Forum Koordinasi, Kolaborasi dan Evaluasi Jabatan Fungsional Statistisi, Pranata Komputer dan Surveyor Pemetaan pada tanggal 22 s.d. 23 Agustus 2024 sesuai undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B.3042/SJ.7/KP.930/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.
 - Menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Jaminan Sosial pada tanggal 30 Agustus 2024. Acara ini turut mengundang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai narasumber.
- b. Rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai pada Juli – September 2024 dan Monitoring Triwulan III 2024.
 - c. Penilaian prestasi kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN pada Juli – September 2024.
 - d. Rekapitulasi prestasi kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN pada Juli – September 2024.
 - e. Rekapitulasi dan monitoring presensi pegawai pada Juli – September 2024.
 - f. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 118/KEPMEN/KP.530.2/VII/2024 tentang Perpanjangan Kedua Masa Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.2660/BPSPL.2/KP.530/VIII/2024 tanggal 2 Agustus perihal Pemanggilan untuk Aktif Bekerja Kembali.
 - g. Penyampaian Usulan Calon Peserta Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Perizinan melalui Penyesuaian dan Permohonan tanda tangan sesuai Surat nomor B.2856/BPSPL.2/KP.930/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
 - h. Melakukan tindak lanjut atas Surat Pengantar Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2987/BPSPL.2/KP.440/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 atas Berkas Pengajuan Tugas Belajar.

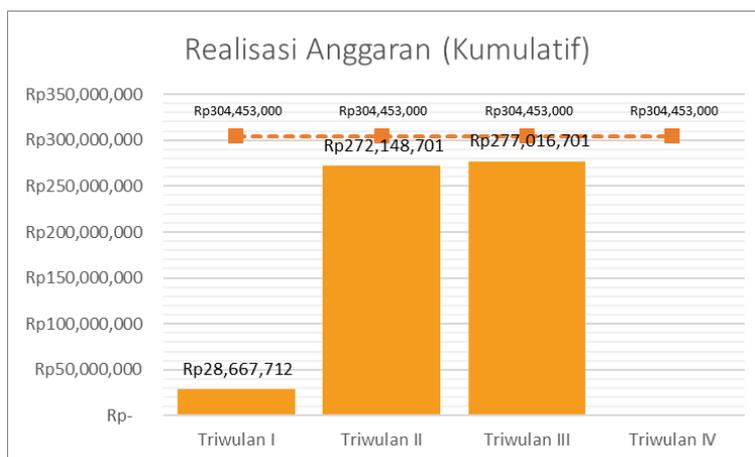
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBD] Layanan Dukungan Manajemen SDM Internal. Realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.12-7. Realisasi Anggaran IKM 17

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBC.954.051] Layanan Manajemen SDM	Rp 304.453.000	Rp 277.016.701 (90,99%)	-
TOTAL		Rp 304.453.000	Rp281.912.413 (90,99%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 277.016.701 atau 90,99% dari pagu anggaran sebesar Rp304.453.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan.



Gambar 3.1.12-5. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024 yaitu:

- d. Rekapitulasi dan monitoring Pengembangan Kompetensi Pegawai.
- e. Rekapitulasi dan monitoring Sasaran Kinerja Pegawai.
- f. Rekapitulasi dan monitoring Presensi Pegawai serta mengikuti pelatihan, bimtek, seminar ataupun *workshop* yang diselenggarakan baik dari BPSPL Pontianak maupun oleh pihak luar.

IKM 18. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak dihitung berdasarkan PerMen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak adalah dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3.1.12-8. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

BB	>70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IKM 18 Sebagai berikut

Tabel 3.1.12-9. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-18	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
88,2	Target Capaian Tahunan			81	-	-	-	83,75	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, berdasarkan rapat pleno Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKRL yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 September 2024, BPSPL Pontianak memperoleh nilai sebesar 85,55 dari nilai maksimum 100 dengan predikat A (memuaskan) sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.5721/DJPKRL.1/RC.610/IX/2024 perihal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 pada BPSPL Pontianak. Berdasarkan nilai tersebut, BPSPL Pontianak telah mencapai target sebesar 81 dengan persentase capaian sebesar 105,61%. Hasil penilaian per komponen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.12-10. Komponen Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2024
1	Perencanaan Kinerja	30	25.80
2	Pengukuran Kinerja	30	27.60
3	Pelaporan Kinerja	15	12.90
4	Evaluasi Internal	25	19.25
Nilai Hasil Evaluasi		100	85.55
Predikat Penilaian			A

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Namun, capaian nilai PM SAKIP pada tahun 2023 yaitu sebesar 88,2 sehingga terdapat penurunan nilai PM SAKIP sebesar 2,65 jika dibandingkan dengan nilai PM SAKIP berdasarkan hasil pleno.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PKRL sebesar 83,75. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, progres capaian sebesar 85,55 telah melebihi target resntra Ditjen PKRL 2020 – 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Pontianak sebesar 92. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, progres capaian sebesar 85,55 belum dapat memenuhi target renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan III dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Hal itu didukung oleh koordinasi yang baik antara tim pengelola kinerja dan sub tim perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja. Pemahaman tim pengelola kinerja mengenai

aspek-aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

Terdapat beberapa target Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang belum sepenuhnya *achievable*. Laporan Kinerja BPSPL Pontianak telah memuat tabel perbandingan capaian kinerja BPSPL Makassar. Namun, belum memuat analisis lebih lanjut terkait perbedaan capaian kinerja, khususnya justifikasi capaian kinerja yang lebih rendah. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja karena berdasarkan hasil NKA pada BPSPL Pontianak terdapat penurunan efisiensi kinerja. Nilai efisiensi BPSPL Pontianak pada tahun 2022 sebesar 6,62 sedangkan 2023 sebesar 1,15.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengukuran kinerja berbasis daring, pemantauan capaian kinerja berbasis daring, pembuatan basis data laporan serta data dukungnya dengan memanfaatkan *dropbox*, *google drive* dan aplikasi penyimpanan lainnya. Selain itu, terdapat pengembangan *google form* Montan (Monitoring Kegiatan) BPSPL Pontianak sebagai Inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja internal berbasis google form untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan, serta perbaikan ke depannya. Pengisian form ini dapat membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja, capaian output di SAKTI, Laporan SPIP MR, dan lain-lain pada setiap bulan.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Mengikuti kegiatan Verifikasi Pelaporan e-Monev Bappenas dan SMART DJA pada tanggal 1 - 5 Juli 2024 di Grand Mercure Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Pada verifikasi e-Monev Bappenas untuk BPSPL Pontianak, persentase kemanfaatan hingga bulan Juni 2024 telah mencapai 46%. Pelaksanaan dan Serapan Anggaran cenderung meningkat dari bulan Januari hingga Juni 2024. Persentase serapan anggaran hingga bulan Juni 2024 sebesar 45,33% sementara persentase pelaksanaan kegiatan hingga bulan Juni 2024 sebesar 50,28%.
- b. Pengisian Capaian Kinerja Triwulan II pada aplikasi Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id>). Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) untuk IKU dan IKM BPSPL Pontianak pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 105,24% dengan kategori hijau (Baik). Capaian kinerja Triwulan II mengalami penurunan sebesar 10% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan I yang sebesar 116%.
- c. Menghadiri kegiatan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 lingkup DJPKRL pada tanggal 15 dan 16 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.4003/DJPKRL.1/TU.330/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.
- d. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II tahun 2024. Laporan Kinerja telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui surat nomor B.2490/BPSPL.2/TU.140/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024.
- e. Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP di Yogyakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.4602/DJPKRL.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

- f. Berdasarkan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024, BPSPL Pontianak mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 105,94 dengan predikat baik sesuai surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.4946/DJPKRL.1/RC.610/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- g. Menghadiri pleno Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 11 – 13 September 2024. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, BPSPL Pontianak memperoleh nilai sebesar 85,55 dari nilai maksimum 100 dengan predikat A (memuaskan) sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.5721/DJPKRL.1/RC.610/IX/2024 perihal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 pada BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.12-6. Kegiatan pleno Evaluasi AKIP

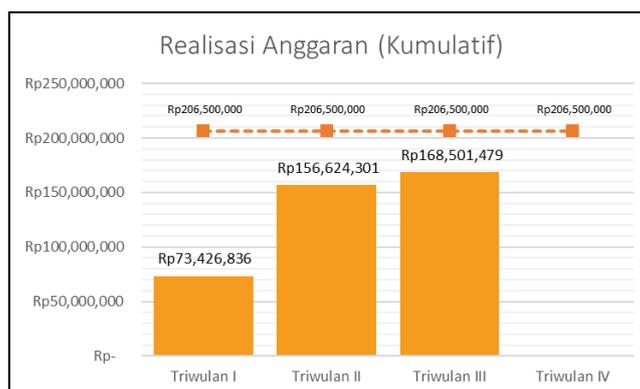
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan [2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Tabel 3.1.12-11. Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 97.000.000	Rp 83,000,952 (67,70%)	-
2.	2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 109.500.000	Rp 85,500,527 (78,08%)	-
TOTAL		Rp206,500,000	Rp168.501.479 (81,59%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp168.501.479 atau 81,59% dari pagu anggaran sebesar Rp206,500,000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.



Gambar 3.1.12-7. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu menyusun laporan kinerja Triwulan IV tahun 2024, pembahasan pengukuran kinerja lingkup Ditjen PKRL Triwulan IV tahun 2024, verifikasi capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024.

IKM 19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan IV Tahun 2024. Teknik perhitungan dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.12-12. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-19	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
4	3	3	100	4	75	-	-	3	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III tahun 2024 telah tercapai 2 (dua) dokumen (100%) dari target 2 (dua) dokumen. Capaian IKM 19 berdasarkan:

- Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.90/BPSPL.2/TU.140/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember dan Triwulan IV Tahun 2023; dan
- Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1123/BPSPL.2/TU.140/IV/2024 tanggal 19 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.
- Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2264/BPSPL.2/TU.140/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024.
- Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3443/BPSPL.2/TU.140/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Triwulan III/semester 1 tahun 2023 adalah sama meliputi 3 (tiga) dokumen (100%).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar 3. Capaian kinerja pada Triwulan

III tahun 2024 telah berkontribusi dalam pemenuhan dokumen SPIP pada target Renstra DJPRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 4 (empat) dokumen di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2024 dengan jumlah 3 (tiga) dokumen telah berkontribusi 75% dari Target Renstra BPSPL Pontianak. Tidak terdapat target pada Renstra BPSPL Pontianak 2020 - 2024. Pemenuhan dokumen telah berkontribusi pada pemenuhan target PK BPSPL Pontianak Tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemenuhan dokumen SPIP telah berhasil tercapai 100% dari target Triwulan III 1 tahun 2024. Hal ini dikarenakan telah disusun Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPKRL tepat waktu setiap triwulan (minggu pertama setelah triwulan berakhir), maksimal tanggal 10. Sedangkan Laporan SPIP Triwulan III tahun 2024 telah disampaikan tepat waktu sebelum tanggal 10 Oktober 2024 (berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3443/BPSPL.2/TU.140/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024).

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.4152/DJPKRL.1/HP.660/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Penguatan Penerapan SPIP melalui Model Tiga Lini (Three Lines Models).
- b. Menghadiri kegiatan Pembahasan Hasil Evaluasi MR Lingkup Ditjen PKRL TA 2024 pada 26 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.4297/DJPKRL.1/TU.330/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.
- c. Melakukan tindak lanjut atas Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.4298/DJPKRL.1/TU.210/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 hal Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) dan Pengendalian Penyusunan Anggaran dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2025.
- d. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.4152/DJPKRL.1/HP.660/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Penguatan Penerapan SPIP melalui Model Tiga Lini (Three Lines Models).
- e. Menghadiri kegiatan Pembahasan Hasil Evaluasi MR Lingkup Ditjen PKRL TA 2024 pada 26 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.4297/DJPKRL.1/TU.330/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.
- f. Melakukan tindak lanjut atas Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.4298/DJPKRL.1/TU.210/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 hal Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) dan Pengendalian Penyusunan Anggaran dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2025.
- g. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.4152/DJPKRL.1/HP.660/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Penguatan Penerapan SPIP melalui Model Tiga Lini (Three Lines Models).

- h. Menghadiri kegiatan Pembahasan Hasil Evaluasi MR Lingkup Ditjen PKRL TA 2024 pada 26 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.4297/DJPKRL.1/TU.330/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.
- i. Melakukan tindak lanjut atas Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.4298/DJPKRL.1/TU.210/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 hal Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) dan Pengendalian Penyusunan Anggaran dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2025.
- j. Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan II Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2264/BPSPL.2/TU.140/VII/2024 9 Juli 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Triwulan II Tahun 2024.
- k. Bulan Juli 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2722/BPSPL.2/TU.140/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Agustus Tahun 2024.
- l. Bulan Agustus telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3101/BPSPL.2/TU.140/IX/2024 tanggal 9 September 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Agustus Tahun 2024

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal, dengan Rincian Output [EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM 19 Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp5.840.866 atau 37,96% dari pagu anggaran Rp15.388.000.

Tabel 3.1.12-13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBD.953.051.D] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP MR)	Rp15.388.000	Rp5.840.866 (37,96%)	-
TOTAL		Rp15,388,000	Rp5.840.866 (37,96%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana Aksi Triwulan IV adalah:

- a. Penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024, serta melakukan publikasi Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024.
- b. Menyusun Laporan SPIP Bulan Oktober, November, dan Triwulan IV Tahun 2024

IKM 20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office* KKP pada laman <https://portal.kkp.go.id/kkp>. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin *upload* keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud adalah:

- a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5.

- b. Konten berupa infografis dengan poin 1.
- c. Konten video/*campaign* diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:

- Keaktifan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan.
- Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin dan maksimal 4 poin *upload* keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Pengukuran level II dihitung dari keaktifan Eselon II
- Sesditjen PRL menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKM MP masing-masing unit kerja eselon II.

Tabel 3.1.12-14. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-20	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
116,65	94	133,33	120	94	120	90	120	90	120

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III tahun 2024 IKM tersebut telah tercapai melebihi target tahunan yaitu 120% dengan persentase capaian 133,33% dari target nilai 94. Sehingga target pada Renstra BPSPL Pontianak maupun Renstra DJPRL telah tercapai melebihi yang ditargetkan. Capaian IKM 20 disampaikan oleh melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.5909/DJPKRL.1/TU.140/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Penyampaian Capaian Persentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024. Nilai MP pada Triwulan III mengalami peningkatan sebesar 16,66% dari Triwulan II dengan rata-rata nilai MP sebesar 122,22%.

4. BPSPL Pontianak	
BPSPL Pontianak	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4.0
Skor	133.3%
Nilai MP	133.3%
Nilai MP TW I	116.67%
Nilai MP TW II	116.67%
Nilai MP TW III	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	122.22%

Gambar 3.1.12-8. Nilai MP BPSPL Pontianak

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 yaitu 133,33 (120% dari target triwulanan 94), sedangkan capaian Triwulan III 1 tahun 2023 yaitu 100 (108,70% dari target triwulanan 92). Artinya terdapat kenaikan capaian MP pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 33,33%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 90 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 120% (133,33 dari 90). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian BPSPL Pontianak pada Triwulan III tahun 2024 telah berkontribusi dalam pencapaian target renstra Ditjen PKRL

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 90 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III/semester 1 tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 120% (133,33 dari 90). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan III sebesar 133,33% (120% dari target triwulanan 94). Hal itu didukung oleh pemanfaatan aplikasi Portal KKP yang digunakan oleh pegawai lingkup BPSPL Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena pekegiatan pendukung dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu Keaktifan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal *Collaboration Office* KKP. Dokumentasi kegiatan rapat/seminar yang diunggah telah dilengkapi dengan foto dan notulensi serta narasi 5W1H.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan III.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan IV yaitu Keaktifan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal *Collaboration Office* KKP pada Oktober – Desember 2024.

IKM 21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Capaian IKU ini dinilai dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode Triwulan III Tahun 2023 s.d. Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPSPL Pontianak. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi dihitung secara manual oleh Setditjen PRL. Jika tidak ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan maka perhitungan capaian sama

dengan target. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada rekomendasi, maka perhitungan capaian 100 sehingga capaian pada kinerja sebesar 120%.

Tabel 3.1.12-15. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	80	100	120	80	120	80	120	80	120

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III tahun 2024, IKM 21 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan telah tercapai 100% (120%) dari target 80. Capaian IKM 17 disampaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.5923/DJPKRL.1/HP.470/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Ditjen PKRL" Triwulan III Tahun 2024 (Sumber: Setditjen PKRL 10 Oktober 2024). Hal ini juga didukung dengan capaian 100% pada aplikasi SIDAK KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 adalah 100% (120% dari target triwulanan 80%), sedangkan capaian Triwulan III tahun 2023 adalah 100% (120% dari target triwulanan 75). Sehingga capaian Triwulan III tahun 2024 sama dengan capaian Triwulan III tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 80% pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 120% (100% dari 80%). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian sebesar 100% tindak lanjut hasil rekomendasi telah berkontribusi terhadap Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 80% pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 120% (100% dari 80%). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target Renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam

tindak lanjutnya, BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya.

7. Kegiatan Pendukung

Pada periode Triwulan III (Juli – September) Tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada bulan sebelumnya, terdapat rekomendasi yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor 126/ITJ.1/HP.410/VII/2024 tanggal 2 Juli hal Laporan Hasil Evaluasi PNBP TA 2023 – 2024 pada BPSPL Pontianak. Adapun rekomendasi yang diberikan tersebut telah dilakukan tindak lanjut dan diunggah pada SIDAK sebagai berikut.

- a. Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak No. B.1925/BPSPL.2/KU.340/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024 hal Laporan Penggunaan PNBP Semester 1 Tahun 2024.
- b. Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak No. B.2382/BPSPL.2/PRL.430/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024 hal Koordinasi Hasil Rekomendasi kepada Direktur KEBP.
- c. Penyampaian Memorandum Kepala BPSPL Pontianak No. 14/BPSPL.2/HP.410/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024 hal Instruksi kpd Ketua Tim Kerja dan Bendahara Penerimaan.
- d. Penyampaian Memorandum Kepala BPSPL Pontianak No. 13/BPSPL.2/PRL.430/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024.
- e. Penyampaian BAP Stok No. B.2237/BPSPL.2/KP.510/VII/2024 Tanggal 5 Juli 2024.

Selanjutnya BPSPL Pontianak menghadiri Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada DJPKRL Periode Triwulan III Tahun 2024 secara daring pada 24 September 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5628/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan III.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu melakukan monitoring terhadap temuan Inspektorat Jenderal dengan memantau aplikasi SIDAK.

IKM 22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Pontianak Tahun 2023. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Tabel 3.1.12-16. Capaian IKM 22 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-21	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	Periode Capaian Tahunan			100	-	100	-	≤1	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Pada Triwulan III belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan III.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal lebih kecil atau sama dengan 1 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu persentase penyelesaian temuan LHP BPK sebesar 100% pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKM belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan III.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan III.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Triwulan IV.

IKM 23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)

Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

- a. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
- b. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah disepakati pada pleno hasil penilaian evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup DJPKRL. Nilai Efektivitas tersebut terbagi kedalam kategori sebagai berikut.

Tabel 3.1.12-17. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah

No	Predikat	Nilai	Interpetasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan

5.	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut
----	---	------	--

Capaian IKM 23 Sebagai berikut

Tabel 3.1.12-18. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-23	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	Target Capaian Tahunan			80	-	72,5	-		

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan inventarisasi bantuan KOMPAK yang telah diberikan dan melakukan koordinasi terkait dengan Monitoring dan Evaluasi KOMPAK.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Renstra IKM tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena tidak terdapat target tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Tingkat Efektivitas Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak sebesar 72,5% pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena belum dapat dilakukan pada Triwulan III.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

a. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah dilakukan pada tanggal 9 – 12 September 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi bantuan KOMPAK yang sudah diserahkan pada tahun 2023. Pelaksanaan monitoring dilakukan kepada Pokmaswas Penyu Baro yang beralamat di Desa Sungai Keran, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang dan Perkumpulan Peduli Mangrove Surya Perdana Mandiri yang beralamat di Kel. Setapak Besar, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang. Secara umum, kondisi barang bantuan sebagian besar dalam kondisi baik. Pemanfaatan bantuan sudah sesuai dengan peruntukannya. Selain untuk menunjang kegiatan konservasi, barang bantuan juga bermanfaat untuk ekonomi masyarakat. Dalam hal pemenuhan kewajiban dan larangan, kelompok telah berkomitmen dan melaksanakan poin-poin tersebut.



Gambar 3.1.12-9. Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK

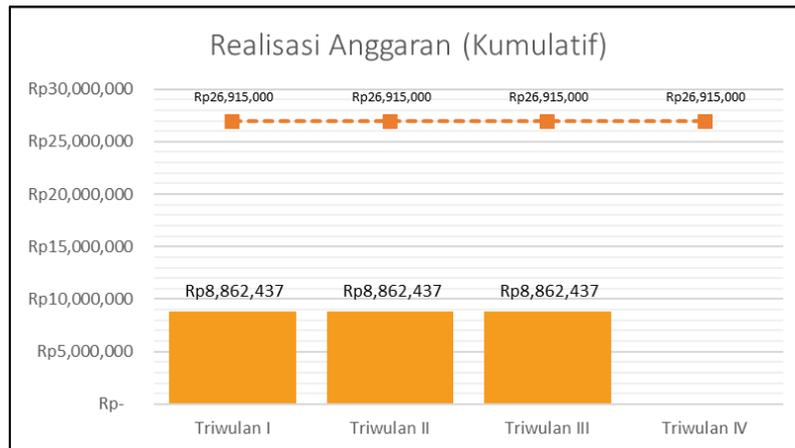
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Realisasi anggaran per Klasifikasi Capaian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.12-19. Realisasi Anggaran IKM 23 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.QEH.001.052] Monitoring dan Evaluasi KOMPAK	Rp26.915.000	Rp8.862.437 (32,93%)	-
TOTAL		Rp26.915.000	Rp8.862.437 (32,93%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 8.862.437 atau 32,93% dari pagu anggaran sebesar Rp26.915.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Perjalanan Dinas Biasa.



Gambar 3.1.12-10. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencanan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu memeriksa kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Kelompok Masyarakat yang telah mendapatkan bantuan serta melakukan koordinasi terkait Monitoring dan Evaluasi bantuan KOMPAK.

IKM 24. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi: Pengawasan sistem kearsipan internal, Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif dan Pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Pontianak akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Tabel 3.1.12-20. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 3.1.12-21. Capaian IKM 24 BPSPL Pontianak

SK-12	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-24	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
0	Target Capaian Tahunan			65	-		-		-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, berdasarkan Verifikasi Data Pengawasan Internal Kearsipan Internal Lingkup UPT pada tanggal 7 Agustus 2024, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai pengawasan internal kearsipan sebesar 96 dengan kategori A (memuaskan).

Tabel 3.1.12-22. Tabel nilai pengawasan kearsipan

NO.	UNIT PENGOLAH	ASPEK						NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	RANK DI UP KKP
		PAD			SDK							
		Penciptaan (25)	Penggunaan (25)	Pemeliharaan (25)	Penyusutan (25)	SDM (50)	SARFRAS (50)					
1	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	22,59	25,00	25,00	23,96	16,37	50,00	48,27	33,19	81,46	A (MEMUASKAN)	95
2	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Padang	25,00	25,00	25,00	25,00	17,57	50,00	50,00	33,78	83,78	A (MEMUASKAN)	69
3	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Pontianak	22,60	25,00	25,00	23,96	16,17	50,00	48,28	33,08	81,36	A (MEMUASKAN)	96
4	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Makassar	23,44	25,00	23,81	23,96	19,64	45,24	48,10	32,44	80,54	A (MEMUASKAN)	106

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKM tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKM tersebut dalam Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKM belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dalam penyampaian Revisi DIPA dapat dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM yaitu:

- a. Koordinasi Kearsipan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 2 s.d. 5 Juli 2024 di Bandung sesuai Surat Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.2942/SJ.8/TU.330/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
- b. Menghadiri Verifikasi Data Pengawasan Internal Kearsipan Internal Lingkup UPT Selaku Unit Pengolah Tahap II tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus sesuai undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B.4185/SJ.6/TU.220/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
- c. Menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Lingkup Ditjen PKRL pada 12 s.d. 14 September 2024 di Yogyakarta berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5353/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 23.098.452 atau 67,30% dari pagu anggaran sebesar Rp 34.320.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 3.1.12-23. Realisasi Anggaran IKM 24 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	Rp34.320.000	Rp23.098.452 (67,30%)	-
TOTAL		Rp34.320.000	Rp23.098.452 (67,30%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Triwulan IV.

3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) lain di Lingkup Ditjen PKRL dapat dilihat pada Tabel 3.1.12-1 di bawah ini. Sebagian besar Indikator Kinerja diukur secara tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan unit kerja lain. Pada IKU Bantuan Kelompok Masyarakat yang diserahkan, BPSPL Pontianak memiliki capaian 2 kelompok dari target 2 kelompok (100%), jika dibandingkan dengan unit kerja lain, capaian BPSPL Pontianak dan LPSPL Serang (2 kelompok) lebih rendah dibandingkan dengan unit kerja lain (3 kelompok). Hal itu dikarenakan terdapat penurunan target di BPSPL Pontianak dan LPSPL Serang menjadi 2 kelompok disebabkan terdapat penurunan anggaran sehingga perlu penyesuaian target terhadap anggaran. Pada IKU pelaporan SPIP, semua unit kerja telah menyampaikan Laporan SPIP kepada Ditjen PKRL. Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar oleh BPSPL Pontianak pada Triwulan III dengan unit kerja lain, yaitu mendapatkan nilai 133,33%. Pada IKU Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti, semua unit kerja telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 100%.

Tabel 3.1.12-1. Perbandingan Capaian Kinerja BPSPL Pontianak dengan Unit Kerja Lain

No	IKU	BPSPL Pontianak		BPSPL Padang		BPSPL Makassar		BPSPL Denpasar		LPSPL Serang		LPSPL Sorong	
		Target	Capaian										
1	Nilai PNPB BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan											
2	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan											
3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	Periode Pengukuran Tahunan											
4	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan		Tidak ada									
5	Daerah Yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	Periode Pengukuran Tahunan											
6	Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan											
7	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan											
8	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Kompak) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3
9	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru	Periode Pengukuran Tahunan											
10	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL pontianak	Periode Pengukuran Tahunan		7	5								

No	IKU	BPSPL Pontianak		BPSPL Padang		BPSPL Makassar		BPSPL Denpasar		LPSPL Serang		LPSPL Sorong	
		Target	Capaian										
11	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan											
12	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan											
13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan											
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Semesteran											
15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan											
16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan											
17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Semesteran											
18	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan											
19	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94	133.33	94	133.33	94	133.33	94	133.33	94	133.33	94	133.33
21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100
22	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan											
23	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan											
24	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan											

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2024 Nomor: SP DIPA 032.07.2.477425/2024 dengan pagu anggaran sebesar **Rp18.598.113.000**. Realisasi anggaran diadopsi dari aplikasi online OMSPAN di <https://spanint.kemenkeu.go.id/>. Pada Triwulan III tahun 2024, realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar **Rp14.764.929.183** atau **79,39%** dari pagu anggaran. Adapun pagu dan realisasi per-kegiatan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23.1.12-1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan III

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
1.	(2362) Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	RM dan PNP	5.876.306.000	4.044.915.343	68,83	-
2.	(2363) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	RM	100.000.000	50.380.983	50,38	-
3.	(2366) Perencanaan Ruang Laut	RM dan PNP	1.150.000.000	816.722.153	71,02	-
4.	(2367) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	RM	10.671.807.000	9.074.183.016	85,03	-
5.	(4346) Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	RM	800.000.000	778.727.688	97,34	-
Total			18.598.113.000	14.764.929.183	79,39	

Sumber data: Aplikasi OMSPAN BPSPL Pontianak per 30 September 2024

Selain itu, alokasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan social serta belanja perjalanan. Belanja barang dipergunakan untuk :
3. Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

4. Belanja Barang Non Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
5. Belanja Modal, pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau penambahan nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran BPSPL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.122-3.1.12-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Periode	Pagu (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1.	(51) Pegawai	Triwulan III	6.297.000.000	5.353.952.361	85,02
5.	(52) Barang	Triwulan III	11.508.113.000	8.778.878.000	76,28
9.	(53) Modal	Triwulan III	793.000.000	632.098.822	79,71

(*) *Blokir Anggaran*

Sumber Data : BPSPL Pontianak (Aplikasi Omspan per tanggal 30 September 2024)

Dari total pagu anggaran berdasarkan revisi terakhir (Bulan September/Triwulan III) alokasi untuk belanja pegawai sebesar 33,86%, untuk belanja barang sebesar 61,88% dan untuk belanja modal 4,26%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada Triwulan III sebesar Rp 5,353,952,361 (85,02%). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (Suami/Istri PNS, anak PNS, struktural PNS, fungsional PNS, PPh PNS, Beras PNS dan tunjangan umum PNS) yang melekat pada pembayaran gaji PNS, uang makan dan tunjangan kinerja PNS. Selain itu, realisasi belanja pegawai juga digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK.
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Triwulan III sebesar Rp 8,778,878,000 atau 76,28% dari pagu anggaran Rp 11.508.113.000. Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut
 - a. Belanja barang operasional digunakan untuk untuk belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), sewa kantor/pos pelayanan, jasa lainnya, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin.
 - b. Belanja barang non operasional digunakan untuk belanja bahan, sewa, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal sampai dengan Triwulan III sebesar Rp 632,098,822 (79,71%). Belanja modal digunakan untuk pengadaan sebagai berikut:
 - Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Cempedak Lestari di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket SPK Nomor 55/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
 - Pengadaan Sarpras Wilker Mahakam Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 57/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.

- Pengadaan Sarpras Wilker Mahakam Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 57/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Air Conditioner sebanyak 1 Unit SP Nomor 59/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Display KIOSK sebanyak 1 Unit SP Nomor 61/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- Pengadaan Rumah Rakit Monitoring Pesut di Kawasan Mahakam Wilayah Hulu TA 2024 sebanyak 1 Paket SP Nomor 62/BPSPL.2/PPK/SPK/IX/2024 tanggal 6 September 2024.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan III tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran. Hasilnya terlihat bahwa sebagian besar dari target-target sasaran yang ingin dicapai pada Triwulan III telah tercapai. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan III Tahun 2024 jika dilihat dari nilai **NKO IKU+IKM** dari aplikasi *kinerjaku* sebesar **107,5%** dengan kategori **Baik**. Realisasi anggaran BPSPL Pontianak pada Triwulan III 2024 sebesar **Rp14.764.929.183** atau **79,39%** dari pagu anggaran sebesar Rp 18.598.113.000. Untuk capaian indikator kinerja yang telah tercapai di Triwulan III ini sebagai berikut:

1. Penyerahan Bantuan kompak dengan capaian sebanyak **2 kelompok** dari target 2 kelompok sehingga tercapai **100%**.
2. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 3 laporan dari target 3 laporan sehingga tercapai **100%**.
3. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar dengan capaian **133,33** dari target 94 sehingga tercapai **120%**.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dengan capaian **100%** dari target 80% sehingga tercapai **120%**.

Target IKU dan IKM yang memiliki target pada Triwulan III tercapai secara keseluruhan dengan persentase capaian 100%. Pencapaian target pada Triwulan III masih belum terlihat secara signifikan terhadap target tahunan. Hal ini karena sebanyak 18 Indikator Kinerja Kegiatan memiliki periode capaian yang diukur tahunan.

4.2. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar.
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Perubahan Perjanjian Kinerja pada satuan IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang difasilitasi mata pencaharian baru menjadi 60 (Orang).

4.3. Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti yaitu mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis dan seminar. Selain itu, telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terkait dengan dasar hukum Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi di Perairan Darat oleh KKP. Hasilnya adalah KKP masih belum dapat melakukan pelayanan perizinan kawasan konservasi di perairan darat dikarenakan belum terdapat aturan yang mengatur hal tersebut. Karenanya, hingga Triwulan III BPSPL belum dapat melakukan pelayanan perizinan kawasan konservasi untuk Mahakam Hulu.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2024 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

LAMPIRAN

1. Berita Acara Serah Terima Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024 No B.3260/BPSPL.2/PRL.440/IX/2024 tanggal 23 September 2024.
2. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3101/BPSPL.2/TU.140/IX/2024 tanggal 9 September 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Agustus Tahun 2024
3. Surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.5909/DJPKRL.1/KP.720/X/2024 perihal Penyampaian Capaian Presentase Satuan kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024.
4. Surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.5392/DJPKRL.1/KP.720/X/2024 perihal Capaian IKU 'Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan" Triwulan III Tahun 2024.